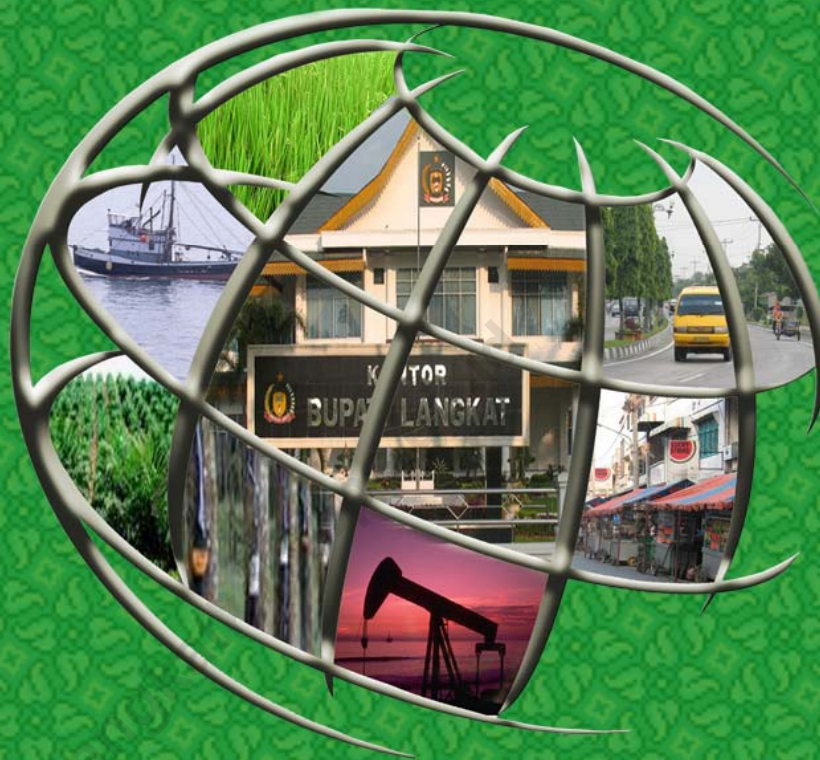




No. Publikasi : 12135.12.03
Katalog BPS : 9302001.1213

PDRB **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** **KABUPATEN LANGKAT 2008 - 2012**



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008-2012

No. Publikasi : 12135.13.03
Katalog BPS : 9302001.1213
Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : xii + 79

Naskah
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Drs. Suharno, M.Sc
- Editor dan Penanggung Jawab Teknis : Ir. Sawaluddin Naibaho, M.Si.
- Koordinator : Ir. Mangatur Rosmeiwati Butar-butar
- Anggota : Imelda Yamin, S.ST.; Oliver Bobby R. Simarmata, S.ST; Edyanto, S.E.; Rahmat Gustiar, S.Si.; Tomry Aritonang, SE.

Gambar Kulit :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

SEJARAH SINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

A. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang

Pada masa Pemerintahan Belanda Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada ditangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :

1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa.

Pemerintahan luhak dipimpin secara Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja didaerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak, yakni :

1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :
 - 1.1 Kejuruan Selesai
 - 1.2 Kejuruan Bahorok
 - 1.3 Kejuruan Sei Bingai
 - 1.4 Distrik Kwala
 - 1.5 Distrik Salapian
2. Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :
 - 2.1 Kejuruan Stabat
 - 2.2 Kejuruan Bingei
 - 2.3 Distrik Secanggang
 - 2.4 Distrik Padang Tualang
 - 2.5 Distrik Cempa

2.6 Distrik Pantai Cermin

3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.

3.1 Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.

3.2 Distrik Pulau Kampai

3.3 Distrik Sei Lapan

Awal 1942, Kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyucu. Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

B. Masa Kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T. M. Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residenya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :

1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang

Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh:

1. T. Ismail Aswhin [1967 – 1974]
2. HM. Iscad Idris [1974 – 1979]
3. R. Mulyadi [1979 – 1984]
4. H. Marzuki Erman [1984 – 1989]
5. H. Zulfirman Siregar [1989 – 1994]
6. Drs. H. Zulkifli Harahap [1994 – 1998]
7. H.Abdul Wahab Dalimunthe, SH [3-9-1998 s/d 20-2-1999]
8. H.Syamsul Arifin, SE [1999 – 2009]
9. Ngogesa Sitepu [2009-sekarang], dan
Budiono, SE sebagai Wakil Bupati

Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat dibagi atas 3 wilayah pembangunan, yakni :

1. Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi :
 - a. Kecamatan Bahorok dengan 18 desa dan 1 kelurahan
 - b. Kecamatan Serapit dengan 10 desa
 - c. Kecamatan Salapian dengan 16 desa dan 1 kelurahan
 - d. Kecamatan Kutambaru dengan 8 desa
 - e. Kecamatan Sei Bingai 15 desa dan 1 kelurahan
 - f. Kecamatan Kuala dengan 14 desa dan 2 kelurahan
 - g. Kecamatan Selesai dengan 13 desa dan 1 kelurahan
 - h. Kecamatan Binjai dengan 6 desa dan 1 kelurahan
2. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi :
 - a. Kecamatan Stabat dengan 6 desa dan 6 kelurahan
 - b. Kecamatan Wampu dengan 13 desa dan 1 kelurahan
 - c. Kecamatan Batang Serangan dengan 7 desa dan 1 kelurahan
 - d. Kecamatan Sawit Seberang dengan 6 desa dan 1 kelurahan
 - e. Kecamatan Padang Tualang dengan 11 desa dan 1 kelurahan
 - f. Kecamatan Hinai dengan 12 desa dan 1 kelurahan
 - g. Kecamatan Secanggang dengan 16 desa dan 1 kelurahan
 - h. Kecamatan Tanjung Pura dengan 18 desa dan 1 kelurahan.

3. Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi :
 - a. Kecamatan Gebang dengan 10 desa dan 1 kelurahan
 - b. Kecamatan Babalan dengan 4 desa dan 4 kelurahan
 - c. Kecamatan Sei Lengan dengan 9 desa dan 5 kelurahan
 - d. Kecamatan Brandan Barat dengan 5 desa dan 2 kelurahan
 - e. Kecamatan Besitang dengan 6 desa dan 3 kelurahan
 - f. Kecamatan Pangkalan Susu dengan 9 desa 2 kelurahan
 - g. Kecamatan Pematang Jaya dengan 8 desa

Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati. Di samping itu dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas otonom, instansi pusat baik departemen maupun non departemen yang kesemuanya merupakan pembantu-pembantu Bupati dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat telah menyelesaikan buku Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Langkat 2008-2012 yang merupakan lanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya.

Publikasi ini menyajikan tabel-tabel pokok yang memuat angka-angka PDRB menurut sektor ekonomi yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000, dan merupakan hasil perhitungan dengan cara metode langsung. Disamping sajian tabel-tabel pokok tersebut, publikasi ini juga menyajikan beberapa indikator pokok ekonomi makro sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Langkat yaitu; struktur perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan sektoral dan PDRB per kapita.

Publikasi PDRB Kabupaten Langkat 2008-2012 ini sangat berguna khususnya bagi pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil pembangunan bidang ekonomi yang telah dicapai dan juga sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.

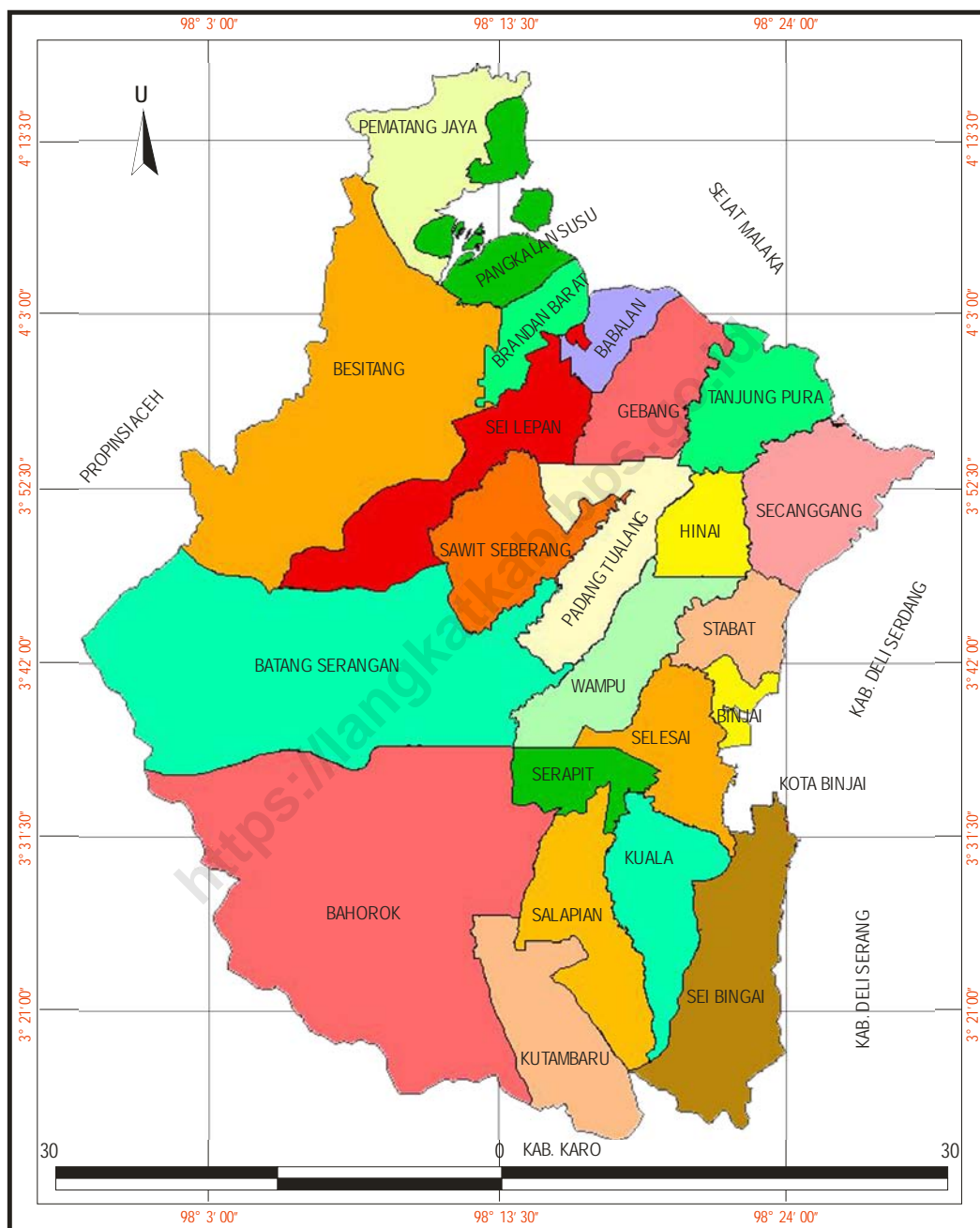
Disadari bahwa publikasi ini masih mengandung kelemahan-kelemahan, terutama oleh keterbatasan data sehingga angka yang disajikan khususnya untuk tahun 2012 masih bersifat sementara, dan akan disempurnakan pada penerbitan selanjutnya. Untuk itu saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Stabat, Agustus 2013
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LANGKAT,
Kepala,

Ir. SAWALUDDIN NAIBAHO, M.Si.
NIP. 19671004 199401 1 001

PETA KABUPATEN LANGKAT



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012	71
Grafik 2. PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 - 2012.....	72
Grafik 3. PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 - 2012.....	73
Grafik 4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012	74
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 - 2012	75
Grafik 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 - 2012	76
Grafik 7. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012	77
Grafik 8. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012	78
Grafik 9. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012.....	79

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
PETA KABUPATEN LANGKAT	iv
SEJARAH SINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Publikasi	3
1.5 Perubahan Tahun Dasar	3
II. KONSEP DAN DEFINISI	7
2.1 Produk Domestik dan Produk Regional	7
2.2 Barang dan Jasa	7
2.3 Output	8
2.4 Biaya Antara	9
2.5 Nilai Tambah	9
2.6 Agregat Produk Domestik Regional Bruto	10
2.7 Ringkasan Agregat Produk Domestik Regional Bruto	12
2.8 Klasifikasi Lapangan Usaha	13

III. METODOLOGI.....	15
3.1 Metode Penghitungan	15
3.2 Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	16
IV. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN SEKTORAL.....	21
4.1 Sektor Pertanian	21
4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	23
4.3 Sektor Industri Pengolahan.....	25
4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	26
4.5 Sektor Bangunan	27
4.6 Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel.....	28
4.7 Sektor Angkutan dan Komunikasi	29
4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	33
4.9 Sektor Jasa-jasa	39
V. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012.....	45
5.1 Besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	45
5.2 Struktur Perekonomian.....	47
5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi	49
5.4 Laju Pertumbuhan Sektoral	51
5.5 PDRB Per Kapita	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)	56
Tabel 2. PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)	57
Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Persentase).....	58
Tabel 4. Distribusi PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Persentase).....	59
Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Persentase)	60
Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Persentase).....	61
Tabel 7. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Tahun Dasar=100)	62
Tabel 8. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012(Tahun Dasar=100).	63
Tabel 9. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Tahun Dasar=100).....	64
Tabel 10. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Tahun Dasar=100)	65
Tabel 11. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (Tahun Dasar=100)	66
Tabel 12. Laju Pertumbuhan Harga Implisit PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (Persentase).....	67
Tabel 13. Perkembangan Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Per kapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012.....	68
Tabel 14. Perkembangan Beberapa Agregat PDRB dan PDRB Per kapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012	69



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Sasaran
 - 1.4 Publikasi
 - 1.5 Perubahan Tahun Dasar
- <https://lambangkatkab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah melalui suatu mekanisme perencanaan untuk menentukan strategi dan kebijaksanaan agar keputusan yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Demikian juga, hasil pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut sangat diperlukan data statistik yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi makro suatu daerah secara lengkap, akurat dan berkesinambungan.

Salah satu data statistik yang penting dan pokok, yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi makro secara regional adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mampu menggambarkan keadaan ekonomi makro secara sektoral dalam masa waktu satu tahun.

Untuk maksud tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Langkat, maka perlu dilakukan penghitungan/penyusunan publikasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara terus menerus setiap tahun. Data PDRB tahun 2012 ini merupakan kelanjutan dari penghitungan/penyusunan publikasi data PDRB dari tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Tujuan

Penghitungan/penyusunan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Langkat 2008-2012 yang menggunakan tahun dasar 2000 ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ekonomi makro secara sektoral sebagai hasil pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Langkat selama tahun 2008-2012 dan perkembangannya selama kurun waktu lima tahun terakhir yang sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun kalangan lainnya.

1.3. Sasaran

Sasaran penghitungan/penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Langkat 2008-2012 ini adalah untuk menyajikan data statistik pendapatan regional Kabupaten Langkat Tahun 2008-2012 bagi para pengguna data khususnya Pemerintah Daerah, sekaligus untuk menjamin ketersediaan data PDRB Kabupaten Langkat secara series.

1.4. Publikasi

Publikasi ini berisi tabel-tabel PDRB atas biaya faktor produksi, distribusi persentase, indeks berantai, indeks harga implisit, angka pendapatan PDRB per kapita, atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000, yang disajikan menurut lapangan usaha/sektor.

Untuk melengkapi tabel-tabel tersebut ditambahkan pula penjelasan singkat tentang ruang lingkup, metodologi, konsep dan definisi serta metoda penghitungan nilai tambah masing-masing subsektor. Ulasan deskriptif juga disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan perekonomian regional Kabupaten Langkat.

1.5. Perubahan Tahun Dasar

Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan mengalami pergeseran dari tahun 1993 menjadi tahun 2000. Perubahan tahun dasar ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Secara nasional telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat sehingga

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis.

- b. Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi dan debirokratisasi. Secara nasional sejak tahun 1991 sektor industri peranannya sudah melampaui sektor pertanian dan menjadi primadona perekonomian Indonesia.
- c. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik, masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Akibatnya struktur ekonomi Indonesia tahun 1993 telah berbeda dengan tahun 2000.

Pada dasarnya penetapan tahun 2000 sebagai tahun dasar secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan yang baru "*Sistem Neraca Nasional*" dinyatakan bahwa estimasi PDB atau PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5. Hal ini juga merupakan komitmen pimpinan BPS negara ASEAN tahun 2000, agar besaran angka-angka PDB atau PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.
- b. Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi, cakupan terus mengalami penyempurnaan, dalam jangka waktu tujuh tahun juga telah terjadi perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Perbaikan cakupan terutama di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika) serta disektor jasa-jasa. Disisi lain juga terjadi perubahan dalam komposisi harga antara sektor primer, sekunder dan tersier.
- c. BPS telah merampungkan penyusunan Tabel Input-Output Indonesia 2000, termasuk Sumatera Utara untuk tingkat propinsi. Tabel I-O tersebut telah mengalami uji konsistensi pada tingkat sektoralnya dengan mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan maupun penawaran. Oleh karena itu struktur ekonomi Indonesia yang digambarkan melalui Tabel I-O dapat dijadikan sebagai kerangka dasar (benchmarking) dalam penyempurnaan penghitungan PDB/PDRB, sekaligus dipakai

sebagai tahun dasar dalam penyusunan series baru penghitungan PDB/PDRB, baik sektoral maupun penggunaan.

- d. Ketersediaan data dasar (raw data) baik harga maupun volume (quantum) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan kondisi pada tahun 1993. Hal itu dimungkinkan disebabkan berbagai Departemen/Kementrian maupun Instansi Pemerintah lainnya juga ikut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing. Dengan dukungan data yang lebih lengkap, terinci dan konsisten diharapkan estimasi PDB/PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

<https://langkatkab.bps.go.id>



BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

- 2.1 Produk Domestik dan Produk Regional
- 2.2 Barang dan Jasa
- 2.3 Output
- 2.4 Biaya Antara
- 2.5 Nilai Tambah
- 2.6 Agregat PDRB
- 2.7 Ringkasan Agregat PDRB
- 2.8 Klasifikasi Lapangan Usaha

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi sangat diperlukan dalam rangka penghitungan PDRB, dan bagi para pengguna data sangat membantu untuk memahami tentang data PDRB dan PDRB Per Kapita. Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penghitungan PDRB.

2.1. Produk Domestik dan Produk Regional

Dalam menghitung pendapatan regional, hanya dipakai konsep domestik, yang berarti bahwa seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh seluruh sektor/ lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah/region (dalam hal ini Kabupaten/Kota) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB menunjukkan gambaran *Production Originated*.

Sampai saat ini baik BPS Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara belum dapat menyajikan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk, karena masih sulitnya memperoleh data yang menggambarkan arus keluar masuk pendapatan yang mengalir antar Kabupaten/Kota bahkan Propinsi. Dalam pengertian ini pendapatan dari faktor produksi yang berada di suatu Propinsi/Kabupaten/Kota tetapi dimiliki oleh penduduk dari Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari pendapatan Propinsi maupun Kabupaten/Kota tempat tinggal pemilik.

2.2. Barang dan Jasa

Barang adalah produksi berbentuk fisik yang dapat disentuh dan dilihat, sedangkan jasa adalah produksi yang tidak dapat disentuh dan dilihat. Barang dan jasa tersebut diproduksi melalui suatu proses produksi atas partisipasi faktor produksi yang terdiri dari : tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan.

Dalam konsep ini Produksi terdiri atas tiga jenis, yaitu :

a. Produksi Utama

Adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan nilai (produksi) yang paling penting.

b. Produksi Ikutan

Adalah produk yang dihasilkan bersama-sama dengan produksi utama atau dalam prosesnya merupakan teknologi unggul dengan produksi utama.

c. Produksi Sampingan

Adalah produksi yang dihasilkan sejalan dengan produksi utama tetapi dalam proses teknologi yang terpisah dan biasanya digunakan untuk mendukung produksi utama.

Proses produksi didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah nilai, kegunaan atau manfaat dari suatu barang dan jasa. Pengusaha / usaha yang memproduksi barang dan jasa tersebut adalah sebagai produsen barang dan jasa, sedangkan orang/badan yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dinamakan sebagai konsumen.

2.3. Output

Output adalah merupakan hasil akhir dari kegiatan proses produksi dari suatu kegiatan ekonomi yang berbentuk barang dan jasa. Output tersebut hasilnya ada yang dijual/dipasarkan maupun dikonsumsi sendiri atau dengan kata lain, output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum produksi dengan harganya. Dalam penghitungan PDRB, output tersebut terdiri dari tiga cakupan, yaitu :

- a. Output perusahaan/usaha adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu baik meliputi produksi utama, produksi ikutan, maupun produksi sampingan. Pada umumnya nilai output merupakan hasil perkalian antara jumlah/kwantitas (barang dan jasa) dengan harga per unitnya.
- b. Output jasa pemerintahan adalah sama dengan total pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu merupakan jumlah dari belanja barang dan jasa (biaya antara),

upah, dan gaji pegawai serta penyusutan barang modal pemerintah. Hampir seluruh output pemerintah dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri.

- c. Output lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan adalah sama dengan jumlah pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu terdiri dari; biaya antara, pembayaran upah dan gaji, penyusutan serta pajak tak langsung (kalau ada). Sebagian besar output dari lembaga ini dikonsumsi oleh lembaga itu sendiri.

2.4. Biaya Antara

Biaya antara (*Intermediate Cost*) terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan dalam proses produksi oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu (biasanya dalam satu tahun), atau dengan kata lain adalah seluruh biaya yang dipakai dalam melakukan proses produksi pada periode tertentu. Data mengenai biaya antara, pada umumnya diperoleh dari SKPR (Survei Khusus Pendapatan Regional) yang dilaksanakan untuk sektor-sektor tertentu secara berkala (biasanya setiap tahun). Dari hasil pengolahan SKPR didapatkan struktur biaya, yaitu : rasio antara dan nilai tambah terhadap output masing-masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang disurvei. Informasi lain yang dapat diperoleh adalah indikator produksi, harga dan indikator-indikator lainnya. Estimasi NTB dapat diperoleh dengan menggunakan rasio yang dihitung dari struktur biaya seperti tersebut di atas.

Pengambilan sampel dalam SKPR dilakukan dengan cara *purposive*. Tujuannya hanya untuk menghasilkan rasio struktur biaya saja, tidak untuk mengestimasi nilai keseluruhan dari masing-masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang disurvei.

2.5. Nilai Tambah

Nilai tambah terdiri dari 2, yaitu ; Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Nilai Tambah Netto (NTN).

Nilai Tambah Bruto merupakan pengurangan dari nilai output dengan biaya antara, atau apabila dirumuskan menjadi :

$$\text{Nilai Tambah Bruto (NTB)} = \text{Output} - \text{Biaya Antara}$$

Pengertian Nilai Tambah Bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain adalah merupakan penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada region tertentu, dalam rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2.6. Agregat Produk Domestik Regional Bruto

Didasarkan kepada konsep perhitungannya, Produk Domestik Regional Bruto dibedakan atas tiga pengertian yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar, Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar, Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor. Berikut ini akan diuraikan ketiga konsep tersebut serta agregat PDRB lainnya antara lain Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar

Angka PDRB Atas Dasar Harga Pasar diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian dalam suatu wilayah (*region*). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen-komponen pendapatan (upah dan gaji, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jadi dengan menghitung Nilai Tambah Bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto seluruh sektor tersebut akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar.

b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep bruto dan netto adalah bahwa pada konsep bruto faktor penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep netto komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar dikurangi dengan penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai barang-barang modal tetap (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan sebagainya) yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai penyusutan dari seluruh sektor atau subsektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan "penyusutan" yang dimaksud di atas.

c. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan harga pasar disebabkan karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, cukai, dan lain-lain pajak kecuali pajak pendapatan dan perseroan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan kepada biaya produksi atau langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli sehingga akibatnya menaikkan harga barang (produksi). Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang akibatnya menaikkan harga barang, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi terutama unit-unit produksi yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akibatnya adalah menekan /menurunkan harga sehingga harga barang dan jasa dapat lebih dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap harga barang dan jasa (output produksi). Selisih antara pajak tidak langsung dan subsidi dalam perhitungan pendapatan regional disebut pajak tidak langsung netto. Kalau produk domestik regional netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka hasilnya adalah PDRB Atas Dasar Biaya Faktor.

d. Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa produk domestik regional bruto atas biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah. Produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul, atau pendapatan yang berasal dari wilayah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan daerah tersebut, sebab ada sebagian dari pendapatan tersebut yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya suatu perusahaan yang beroperasi secara komersil di suatu daerah tetapi modalnya dimiliki oleh penduduk luar daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan akan menjadi milik penduduk dari luar daerah tersebut sebagai sipemilik modal. Sebaliknya bila ada penduduk dari daerah tersebut yang menanamkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan

akan mengalir ke dalam daerah tersebut. Kalau produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor tadi dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari daerah lain maka hasilnya akan merupakan produk regional netto yaitu merupakan pendapatan yang benar-benar diterima (*income receipt*) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Produk regional netto inilah sebenarnya merupakan pendapatan regional (*regional income*). Akan tetapi karena masih sulitnya mendapatkan data tentang arus pendapatan yang mengalirnya keluar/masuk antar daerah, maka pendapatan regional hingga saat ini masih belum dapat dihitung. Untuk sementara dalam perhitungan ini produk domestik regional netto dianggap sebagai pendapatan regional.

e. Pendapatan Per Kapita

Bila pendapatan regional suatu daerah dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka diperoleh angka pendapatan per kapita (*income per capita*).

2.7. Ringkasan Agregat Produk Domestik Regional Bruto

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka konsep-konsep yang dipakai dalam Pendapatan Regional dapat diurutkan sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (*Gross Regional Domestic Product at market price*) dikurangi dengan penyusutan akan sama dengan :
- b. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (*Net Regional Domestic Product at market price*), dikurangi pajak tak langsung netto akan sama dengan :
- c. Produk Domestik Regional Netto Atas Biaya Faktor (*Net Regional Domestic Product at factor cost*), ditambah pendapatan netto yang mengalir dari/ke luar daerah lain (termasuk luar negeri) akan sama dengan :
- d. Pendapatan Regional (*Regional Income*), bila dikurangi pajak pendapatan perusahaan (*cooperate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*) ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga, bunga netto atas hutang pemerintah akan sama dengan :

- e. Pendapatan perorangan (*personal income*), bila dikurangi pajak rumah tangga, transfer yang dibayarkan rumah tangga, akan sama dengan :
- f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Dengan susunan ini terlihat bahwa pendapatan perorangan merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, dan ternyata tidak seluruh pendapatan regional diterima oleh rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian tidak dibayar kepada rumah tangga akan tetapi merupakan pajak pendapatan perusahaan yang diterima oleh pemerintah, keuntungan yang tidak dibagikan/ditahan perusahaan dan jaminan sosial yang dibayarkan ke instansi-instansi yang berwenang. Tetapi sebaliknya rumah tangga masih menerima tambahan yang merupakan transfer payment baik dari pemerintah maupun perusahaan dan bunga netto atas dasar hutang pemerintah. Bila pendapatan perorangan ini dikurangi dengan pajak yang langsung dibebankan kepada rumah tangga dan hibah yang diberikan oleh rumah tangga maka hasilnya merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan.

2.8. Klasifikasi Lapangan Usaha

Seperti diketahui bahwa angka nominal PDRB adalah penjumlahan/agregasi dari seluruh NTB kegiatan/lapangan usaha. Dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditingkat nasional, sesuai dengan System of National Accounts (SNA). Hal ini juga memudahkan para analis membandingkan PDRB antar kabupaten/kota dengan propinsi dan PDB nasional.

Sektor atau kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang dimaksud dirinci menjadi : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Restoran dan Hotel, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (9) Jasa-jasa.



BAB III

METODOLOGI

- 3.1 Metode Penghitungan
- 3.2 Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

<https://langkahakalibp.go.id>

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Penghitungan

Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu :

a. Metode Langsung

Perhitungan didasarkan sepenuhnya pada data daerah, hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

a.1. Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unut-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi dengan seluruh biaya antara yang dikeluarkan.

a.2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsungnya. PDRB dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.

a.3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto, didalam wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, perhitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

b. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat region. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung mendorong kualitas data daerah, sedang metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah.

3.2 Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Hasil penghitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan.

a. Perhitungan atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga yang berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, sub sektor, dan sektor. Mengingat sifat barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor, maka penilaian NPB/Output dilakukan sebagai berikut :

- a.1. Untuk sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, pertama kali dicari kuantum produksi dengan satuan standar yang biasa digunakan, setelah itu ditentukan kualitas dari jenis barang yang dihasilkan. Satuan dan kualitas yang dipergunakan tidak selalu sama antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Selain itu diperlukan juga data harga per unit/satuan dari barang yang dihasilkan. Harga yang dipergunakan adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen atau harga yang terjadi pada transaksi pertama antara produsen dengan pembeli/konsumen. NPB/Output atas dasar

harga berlaku merupakan perkalian antara kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditas pada tahun yang bersangkutan. Selain menghitung nilai produksi utama, dihitung pula nilai produksi ikutan yang dihasilkan dengan anggapan mempunyai nilai ekonomi. Produksi ikutan yang dimaksudkan adalah produksi ikutan yang benar-benar dihasilkan sehubungan dengan proses produksi utamanya.

- a.2. Untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor bangunan, penghitungannya sama dengan sektor primer. Data yang diperlukan adalah kuantum produksi yang dihasilkan serta harga produsen masing-masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditas pada tahun yang bersangkutan. Selain itu dihitung juga produksi jasa yang digunakan sebagai pelengkap dan tergabung menjadi satu kesatuan usaha dengan produksi utamanya.
- a.3. Untuk sektor-sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah dan jasa perusahaan serta pemerintahan dan jasa-jasa, untuk penghitungan kuantum produksinya dilakukan dengan mencari indikator produksi yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, sub sektor, dan sektor. Pemilihan indikator produksi didasarkan pada karakteristik jasa yang dihasilkan serta disesuaikan dengan data penunjang lainnya yang tersedia. Selain itu diperlukan juga indikator harga dari masing-masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang bersangkutan. NPB/Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator harga masing-masing komoditi/jasa pada tahun yang bersangkutan.

b. Perhitungan atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu.

NTB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Juga untuk melihat perubahan struktural perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

Pada dasarnya dikenal empat cara penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

b.1. Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar. hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan. Selanjutnya nilai tambah atas dasar harga konstan, diperoleh dari selisih output dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping itu data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua komponen tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

b.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti, tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan sub sektor, dan sektor yang dihitung.

Ekstrapolasi juga dapat dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

b.3. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen

(IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan sebagainya, tergantung jenis indeks yang lebih cocok.

Indeks harga di atas dapat pula sebagai inflator, dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

b.4. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan adalah IHK atau IPHB sesuai cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Kenyataan sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan deflasi berganda belum banyak dipakai.



BAB IV

RUANG LINGKUP DAN METODA PENGHITUNGAN SEKTORAL

- 4.1 Sektor Pertanian
- 4.2 Sektor Pertambangan & Penggalian
- 4.3 Sektor Industri Pengolahan
- 4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
- 4.5 Sektor Bangunan
- 4.6 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran
- 4.7 Sektor Pengangkutan & Komunikasi
- 4.8 Sektor Keuangan, Persewaan &
Jasa Perusahaan
- 4.9 Sektor Jasa-Jasa

BAB IV RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan Sub sektor, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

4.1. Sektor Pertanian

a. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup jenis komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedele, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian serta bahan makanan lainnya.

b. Sub sektor Tanaman Perkebunan

Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditi yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa sawit, kemiri, kina, kopi, lada, pala, panili, serat karung, tebu, tembakau, teh serta tanaman perkebunan lainnya.

c. Sub sektor Peternakan dan hasil-hasilnya

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup adalah: sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, serta hewan peliharaan lainnya.

d. Sub sektor Kehutanan

Sub sektor ini mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi yang dicakup meliputi kayu gelondongan (baik berasal dari hutan rimba maupun hutan budi daya), kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, gondorukem, kopal, menjangan, babi hutan, serta hasil hutan lainnya.

e. Sub sektor Perikanan

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditi hasil perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya; ikan mas dan jenis ikan darat lainnya; ikan bandeng dan jenis ikan payau lainnya; udang dan binatang berkulit keras lainnya; cumi-cumi dan binatang lunak lainnya; rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

f. Sub sektor Jasa Pertanian

Jasa pertanian merupakan jasa-jasa khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian berdasarkan suatu pungutan atau kontrak tertentu. Termasuk dalam jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian dengan operatornya dengan syarat pengelolaan dan resiko usaha tersebut dilakukan secara terpisah. Dalam penghitungan nilai tambah sektor pertanian, secara konsep nilai tambah jasa pertanian ini terdistribusi pada masing-masing Sub sektor (misalnya jasa dokter hewan pada sub sektor peternakan, jasa memetik kopi pada Sub sektor perkebunan). Akan tetapi sampai saat ini belum didapat informasi yang lengkap tentang jasa pertanian, maka untuk alasan praktisnya nilai tersebut dianggap terwakili dalam besarnya persentase *mark-up* untuk tiap-tiap sub sektor pertanian.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah sektor pertanian adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Secara umum, *nilai output* setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi yang bersangkutan. Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu *output utama dan output ikutan*. Disamping itu diperkirakan besaran persentase pelengkap (*mark-up*) yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Total output suatu sub sektor merupakan penjumlahan dari nilai output utama dan ikutan dari seluruh komoditi ditambah dengan nilai pelengkapnya. *Nilai Tambah Bruto (NTB)* suatu sub sektor diperoleh dari penjumlahan dari NTB tiap-tiap komoditasnya. NTB diperoleh dari pengurangan nilai output atas harga produsen terhadap seluruh biaya-biaya antara, yang dalam prakteknya biasa dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditi tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000 (2000=100), digunakan metode revaluasi, yaitu dimana seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000. Khusus untuk sub sektor peternakan, penghitungan produksinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni: banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

4.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam tiga Sub sektor, yaitu :

a. Sub sektor Pertambangan minyak dan gas bumi

Pertambangan migas meliputi kegiatan pencarian minyak gas bumi, penyiapan, pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan, serta penampungan migas untuk dapat dijual atau dipasarkan. Komoditas yang dihasilkan adalah minyak bumi, kondensat dan gas bumi. Seperti halnya pada penghitungan seri 1993, cakupan yang digunakan pada penghitungan seri 2000 juga sama.

Metode penghitungan yang digunakan adalah dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku, diperoleh melalui perkalian antara kuantum produksi yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing

tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan output dengan rasio NTB terhadap output pada masing-masing tahun. Sedangkan, output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum produksi yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi tahun 2000 (harga konstan). Melalui perkalian antara output dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

b. Sub sektor Pertambangan Tanpa Migas

Pertambangan tanpa migas meliputi kegiatan pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium fosfat, aspal alam, serta komoditi tambang selain tersebut di atas.

Untuk memperoleh data output beberapa komoditas tambang seperti batubara, bijih bauksit, bijih timah, bijih tembaga, bijih nikel, bijih emas dan perak, tetap digunakan metode pendekatan produksi. Cara yang digunakan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempuh dengan cara yang sama dengan yang digunakan pada sub sektor pertambangan migas, yaitu revaluasi.

Untuk memperoleh output dan NTB komoditi pasir besi, bijih mangan dan belerang menggunakan cara yang berbeda dengan komoditi-komoditi di atas.

c. Sub sektor Penggalian

Sub sektor ini mencakup Penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas.

Termasuk dalam sub sektor penggalian adalah komoditi garam kasar. NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan mengalikan output tersebut

dengan rasio NTB output tahun 2000. Output harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara output atas dasar harga konstan 2000 dengan indeks HPB garam (2000=100). Dengan mengalikan output atas dasar harga berlaku tersebut dengan rasio NTB terhadap output pada masing-masing tahun, diperoleh NTB atas dasar harga berlaku.

Output harga berlaku diperoleh setelah output atas dasar harga konstan 2000 dikalikan dengan indeks HPB penggalian (2000=100). Selanjutnya untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku, output ini dikalikan dengan rasio NTB terhadap output pada masing-masing tahun.

4.3. Sektor Industri Pengolahan

Seperti halnya pada seri tahun dasar 1993, industri pengolahan dibedakan atas dua kelompok besar yaitu, pertama Sub sektor industri pengolahan minyak dan gas bumi (migas), kedua Sub sektor industri pengolahan tanpa migas.

a. Sub sektor Industri Pengolahan Migas dan Pengilangan Minyak Bumi

Pertambangan minyak bumi meliputi juga *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* yang dihasilkan oleh pengilangan gas alam. Pendekatan penghitungan output untuk sub sektor ini menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun. Sedang atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari output atas dasar harga berlaku dikalikan dengan rasio NTB untuk masing-masing tahun, sedang untuk NTB atas dasar harga konstan dikalikan dengan rasio NTB pada tahun dasar.

b. Sub sektor Industri Tanpa Migas

Sejak tahun 1993 industri pengolahan tanpa migas disajikan menurut dua digit kode klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yaitu industri makanan dan tembakau (31), Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (32), industri kayu, bambu dan rotan (33), industri dan barang dari kertas (34), industri kimia dan barang-barang dari kimia dan karet (35), industri barang galian bukan logam (36), industri

logam dasar (37), industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (38), dan industri pengolahan lainnya (39).

Dalam perhitungan pada tahun dasar 2000=100, yang digunakan sebagai acuan adalah tabel Input-Output Sumatera Utara tahun 2000 sehingga semua kode KLUI yang dimulai dengan angka 3 sudah dimasukkan ke dalam sektor industri pengolahan.

4.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

a. Sub sektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun oleh Perusahaan Non-PLN seperti pembangkitan listrik oleh Perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan untuk seri 2000 pada sub sektor ini menggunakan pendekatan produksi.

b. Sub sektor Gas

Kegiatan ini meliputi penyediaan serta penyaluran gas kota kepada konsumen dengan menggunakan pipa. Di Indonesia termasuk di Sumatera Utara, kegiatan ini hanya dilakukan oleh Perum Gas Negara (PGN).

Komoditas gas yang dihasilkan pada Sub sektor ini adalah gas batubara, gas minyak dan gas cracking yang diperoleh dari proses pembakaran batubara, minyak bumi dan cracking. Bersama proses tersebut dihasilkan pula produk ikutan berupa ter, kokas dan minyak ter. Namun sejak tahun 1991 proses pembuatan gas tidak lagi menggunakan bahan baku batubara dan minyak bumi tetapi diganti dengan gas alam (*natural gas*), sehingga tidak menghasilkan produk ikutan.

Pengolahan gas minyak bumi cair (LPG) dan gas alam cair (LNG) yang berkaitan dengan pemurnian minyak dan gas alam digolongkan ke dalam kegiatan industri dan bukan kegiatan sektor gas.

Metode penghitungan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan produksi.

c. Sub sektor Air Bersih

Kegiatan Sub sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian (termasuk dengan proses kimiawi lainnya) untuk menghasilkan air bersih, serta pendistribusian dan penyaluran secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

Metode penghitungan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan produksi.

4.5. Sektor Bangunan

Kegiatan sektor bangunan terdiri dari bermacam-macam kegiatan meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan NTB sektor bangunan adalah melalui pendekatan arus barang (*commodity flows*). Penggunaan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa besarnya output pada sektor bangunan sejalan dengan besarnya input komoditi yang dipergunakan untuk bangunan. Metode estimasi untuk memperoleh output dan NTB sektor bangunan, menggunakan cara ekstrapolasi, yang mana output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dahulu sebelum memperoleh output dan NTB atas dasar harga berlaku.

4.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

a. Sub sektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa mengubah sifat barang tersebut.

Sub sektor perdagangan dalam perhitungan dikelompokkan kedalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga.

Metode yang digunakan yaitu metode arus barang. Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkut barang dagangan yang dikeluarkan oleh pedagang. Dengan cara metode arus barang output dihitung berdasarkan margin perdagangan yang timbul akibat memperdagangkan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta barang-barang yang berasal dari impor. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara total output dengan rasio NTB. Kemudian untuk memperoleh total NTB sub sektor perdagangan adalah dengan menjumlahkan NTB tersebut dengan pajak penjualan dan bea masuk barang impor.

b. Sub sektor Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang digunakan sebagian atau seluruh bangunan tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap, dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan. Alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB sub sektor hotel diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB-nya. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode ekstrapolasi.

c. Sub sektor Restoran

Kegiatan Sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini seperti rumah makan, warung nasi, warung kopi, catering dan kantin.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung NTB sub sektor restoran yaitu pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah.

4.7. Sektor Angkutan dan Komunikasi

a. Sub sektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam Sub sektor pengangkutan terdiri atas Jasa Angkutan Rel, Angkutan Jalan Raya, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan udara dan jasa Penunjang Angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.

Angkutan Rel

Meliputi pengangkutan barang dan penumpang menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Perseroan).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT KAI. Sedangkan output atas harga konstan 2000 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2000.

Angkutan Jalan Raya

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk juga kegiatan carter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlakunya merupakan perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga untuk masing-masing jenis angkutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Pada dasarnya metode estimasi NTB angkutan laut seri tahun dasar 2000 sama dengan seri tahun dasar 1993. Perbedaan kedua seri tersebut terletak dalam penggunaan rasio NTB. Dalam seri 1993, rasio NTB mencerminkan keadaan 1993 serta merupakan rasio gabungan antara kegiatan angkutan penumpang dan barang. Sedangkan seri 2000, rasio NTB mencerminkan keadaan tahun 2000 dimana rasio NTB untuk kegiatan angkutan penumpang dan barang masing-masing berbeda.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas harga konstan dihitung dengan

metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan mobil yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Untuk output atas harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Sumatera Utara.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah kilometer penumpang (km-pnp) dan kilometer barang (km-ton) yang diangkut.

Output atas dasar harga berlaku angkutan udara diperoleh dari perusahaan penerbangan. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya. Output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

Jasa Penunjang Angkutan

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu meliputi jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, danau, darat seperti terminal dan tempat parkir, bongkar muat laut dan darat, keagenan

penumpang, ekspedisi, jalan tol dan jasa penunjang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output dan NTB atas harga berlaku dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya monopoli diperoleh dari pengolahan laporan keuangan BUMN yang terkait. Kegiatan lainnya diperhitungkan dengan mengalikan indikator produksi dengan harga. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio NTB, rasio *mark-up* dan rasio lainnya yang sesuai.

b. Sub sektor Komunikasi

Sub sektor ini terdiri dari kegiatan Pos dan Telekomunikasi dan Jasa Penunjang Komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh perusahaan seperti PT. Telkom dan PT. Indosat. Jasa Penunjang Komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang radio panggil (pager) dan telepon seluler (ponsel).

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku berupa pendapatan/penerimaan Pos dan Giro serta Telekomunikasi diperoleh dari laporan keuangan. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari laporan keuangan berupa penjumlahan upah dan gaji, penyusutan, laba/rugi dan komponen-komponen lainnya dari NTB. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

Output dan NTB jasa penunjang angkutan diestimasi dengan produksi, yaitu dengan menggunakan jumlah perusahaan sebagai indikator produksi, rata-rata pendapatan per perusahaan sebagai indikator produksi, dan rata-rata pendapatan per perusahaan sebagai indikator harganya. Sedangkan Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi.

4.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

a. Sub sektor Bank

Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro tabungan dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya.

Output dari usaha perbankan adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengirim wesel dan sebagainya. Dalam output bank dimasukkan pula imputasi jasa bank yang besarnya sama selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan.

b. Sub sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank, Usaha Jasa Asuransi, Dana Pensiun, Pengadaian dan Lembaga Pembiayaan

Asuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadi musibah/kecelakaan atas barang atau orang tersebut (termasuk tunjangan hari tua). Pada pihak ditanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusak barang atau mengakibatkan terjadinya kematian tertanggung. Jasa asuransi ini dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial serta asuransi kerugian.

Asuransi Jiwa adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko kematian, kecelakaan atau sakit termasuk juga jaminan hari tua/masa depan pihak tertanggung. Nilai pertanggungan ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perjanjian.

Asuransi Kerugian adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan atau kerusakan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besar telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi Sosial adalah usaha perasuransian yang mencakup usaha asuransi jiwa (kerugiaan) yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh/segolongan masyarakat untuk tujuan sosial. Pihak asuransi ini akan menerima/menampung sejumlah iuran/sumbangan wajib dari masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum, seperti; jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa/pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor dan pelayanan hari tua.

Output dari kegiatan asuransi merupakan rekapitulasi dari output asuransi jiwa, asuransi bukan jiwa (asuransi sosial, asuransi dan asuransi kerugian serta broker asuransi).

Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan asuransi berupa biaya umum (seperti pembelian alat tulis kantor, BBM, rekening listrik dan sebagainya), biaya pemeliharaan, sewa gedung dan biaya administrasi. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan selisih antara output dan biaya antara yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara sebagai berikut : untuk asuransi sosial menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah peserta; untuk asuransi kerugian menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB) umum.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjajikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat dan manfaat pensiun ditunda. Jenis dana pensiun dibedakan menjadi dua yaitu Dana Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Output dan NTB atas harga berlaku dari kegiatan Dana Pensiun diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan estimasi output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan cara

deflasi/ekstrapolasi dan sebagai deflatornya/ ekstrapolatornya adalah IHK atau jumlah peserta.

Pegadaian

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

Kegiatannya utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada seseorang atau golongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besar pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

Output dan NTB atas dasar berlaku dari kegiatan Pegadaian diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan Perum Pegadaian. Output terutama terdiri dari sewa modal, bunga, deposito dan lain-lain (sewa rumah). NTB diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah nasabah.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. lembaga pembiayaan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Output dan struktur input atas dasar harga berlaku lembaga pembiayaan ini diperoleh dari Direktori Perbankan dan usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolator adalah jumlah perusahaan.

c. Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjangnya, manager investasi, reksa dana, biro administrasi efek, tempat penitipan harta dan sejenisnya.

Pedagang Valuta Asing

Pedagang valuta asing adalah suatu badan usaha/perusahaan yang memperoleh izin Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan membeli *travel check*, dan perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih ke luar negeri.

Output dari pedagang asing merupakan selisih penjualan valuta asing dengan pembelian valuta asing. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian rasio NTB terhadap output. Sedangkan NTB atas harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi.

Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat atau sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli modal/dana jangka panjang. Modal yang diperjual belikan itu secara kongkrit diwakili oleh bentuk-bentuk efek (efek berharga).

Perantara Perdagangan Efek/Pialang/Broker

Perantara perdagangan efek/pialang/broker adalah perusahaan perantara perdagangan efek yang berperan mempertemukan antara penjual dan pembeli efek, menyediakan informasi bagi kepentingan para pemodal dan lain-lain. Yang bertindak sebagai perantara perdagangan efek dapat dilakukan oleh perorangan atau institusi badan hukum.

Underwriter (Penjamin Emisi)

Underwriter adalah perusahaan yang menjamin penjualan seluruh efek yang diemisikan, baik saham maupun obligasi.

Appraisal (Perusahaan Penilai)

Adalah suatu lembaga yang berfungsi menilai kewajaran harta kekayaan emiten. Penilaian khususnya meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin dan sarana pelengkap lainnya. Disamping itu juga meneliti apakah harta kekayaan tersebut sesuai dengan tujuan semua serta mempunyai manfaat secara teknis dan ekonomis.

Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan

Lembaga ini adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek, serta penyimpanan efek dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain.

Manager Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun atau bank, berdasarkan izin yang diperoleh dari bank.

Penasehat Investasi

Penasehat Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya memberi nasehat, membuat analisa, dan membuat laporan mengenai efek kepada sekurang-kurangnya 15 (lima belas) pihak lain tetapi tidak termasuk : a). Penjamin emisi efek, wakil penjamin emisi efek atau wakil perantara efek. b). Pihak penyelenggara perusahaan yang kegiatannya bukan dalam bidang efek, c). Setiap profesi yang tidak memerlukan izin usaha sebagai penasehat investasi.

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten.

Reksa Dana

Reksa dana adalah emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan efek. Agen ini berbeda dengan pedagang perantara surat-surat berharga.

Tempat Penitipan Harta

Tempat Penitipan Harta adalah perusahaan yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

d. Sub sektor Sewa Bangunan

Sub sektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk sewa, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

e. Sub sektor Jasa Perusahaan, Jasa Hukum (Advokat/Pengacara, Notaris)

Yang dimaksud dengan Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman untuk mensyahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte dan sebagainya.

Jasa Akutansi dan Pembukuan

Jasa Akuntansi dan Pembukuan adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akutansi dan pembukuan.

Jasa Pengolahan dan Penyajian Data

Jasa Pengolahan dan Penyajian Data adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang bersifat umum baik secara elektronik/komputer maupun manual atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk di dalamnya adalah jasa komputer *programming* dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan komputer.

Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik

Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik adalah usaha jasa konsultasi bangunan, jasa survei geologi, penyelidikan tambang/pencarian komoditi pertambangan dan jasa penyelidikan serta sejenisnya.

Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran

Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada pihak lain dalam bentuk pembuatan dan pemasangan iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk dan mengingatkan kepada konsumen tentang produk dari suatu perusahaan/usaha serta dalam penyampaiannya dapat melalui berbagai alat dan media massa.

Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan

Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan adalah usaha persewaan mesin dan peralatannya untuk keperluan pertanian, pertambangan dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi, dan mesin-mesin keperluan kantor.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah perusahaan atau tenaga kerja) dengan indikator harga (rata-rata output perusahaan atau per tenaga kerja).

4.9. Sektor Jasa-jasa

a. Sub sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan

Jasa pemerintahan pada prinsipnya terbagi dua yaitu pertama pelayanan dari pemerintah departemen dan pertahanan, dan kedua pelayanan yang diberikan

oleh badan-badan di bawah departemen tersebut. Pelayanan kedua ini disebut jasa pemerintahan lainnya.

Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

Sektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan.

Belanja pegawai untuk pemerintah yang memegang tata usaha dikategorikan sebagai administrasi pemerintah, sedangkan belanja pegawai guru pemerintah yang ditugaskan mengajar dikategorikan sebagai jasa pendidikan. begitu juga dokter pemerintah yang tidak melayani masyarakat dikelompokkan sebagai administrasi pemerintahan sedangkan dokter pemerintah yang melayani masyarakat dikelompokkan sebagai jasa kesehatan.

Kegiatan-kegiatan ini meliputi semua tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah tingkat I, tingkat II dan desa termasuk angkatan bersenjata.

Jasa Pemerintah Lainnya

Jasa pemerintah lainnya meliputi kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas pemerintah, rumah sakit pemerintah, bimbingan masyarakat terasing, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Unit-unit semacam ini menyediakan pelayanan jasa untuk masyarakat.

Aparat pemerintah yang melayani penyuluhan KB atau memberi penyuluhan kepada masyarakat terasing dikategorikan sebagai jasa kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pegawai pemerintah yang melakukan penjualan karcis masuk taman hiburan, museum atau melayani masyarakat di perpustakaan dikategorikan sebagai jasa hiburan dan kebudayaan.

Belanja pegawai dari sektor ini terdiri dari gaji pokok, honorarium dan tunjangan lainnya. Belanja pegawai yang dipisahkan dari belanja pembangunan ditransfer ke belanja rutin, seperti pembayaran honor pegawai negeri yang turut dalam kegiatan proyek.

Belanja pegawai jasa pemerintah lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik rutin maupun pembangunan adalah untuk guru-guru sekolah negeri, pekerja rumah sakit pemerintah, pekerja bimbingan masyarakat terasing, pekerja perpustakaan dan tempat-tempat rekreasi serta museum pemerintah.

Penyusutan barang modal untuk sektor pemerintahan umum datanya belum tersedia. Sehingga nilai penyusutan diadakan estimasi berdasarkan rasio terhadap belanja pegawai.

Sruktur biaya dari sektor ini tidak memuat unsur surplus usaha. Sedangkan pemerintah tidak melakukan pembayaran pajak tak langsung, sehingga untuk memperoleh nilai tambah bruto diperkirakan dari penjumlahan belanja pegawai serta perkiraan penyusutan. Data untuk estimasi NTB sektor pemerintah umum didasarkan pada realisasi pengeluaran pemerintah.

Belanja pegawai jasa pemerintah lainnya yang ditransfer dari pemerintah pusat dan daerah diperoleh dari anggaran belanja pembangunan menurut sektor dan Sub sektor. Sedangkan belanja pegawai jasa pemerintah lainnya untuk daerah diperoleh dari laporan belanja pegawai menurut jenis pengeluaran.

Perkiraan NTB sektor pemerintah umum dan jasa lainnya atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri menurut golongan kepangkatan.

b. Sub sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan Swasta

Meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset/penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat/YPAC, rumah ibadah dan sejenisnya, yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Output jasa sosial dan kemasyarakatan diperoleh dari hasil perkalian antara masing-masing indikator produksi seperti jumlah murid menurut jenjang

pendidikan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua lanjut usia yang dirawat, jumlah rumah ibadah, jumlah anak cacat yang dirawat dengan rata-rata output per masing-masing indikator.

Jasa Hiburan dan Rekreasi

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersil dan film dokumenter serta reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, kebun binatang, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyar, klub galatama, artis film, artis panggung, karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi yaitu output yang diperoleh dari hasil perkalian antara produksi dengan indikator harga.

Output kegiatan produksi film diperoleh dari perkalian antara jumlah film yang diproduksi dengan rata-rata output per film. Output kegiatan distribusi film diperoleh dari perkalian antara rasio biaya sewa film dengan output bioskop, sedangkan bioskop diperoleh dari perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. Dan NTB atas harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ ekstrapolatornya adalah IHK hiburan dan rekreasi/indeks indikator produksi yang sesuai.

c. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga, yang terdiri dari :

- c.1. Jasa perbengkelan/reparsi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan kecil-kecilan dari kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua, seperti mobil pribadi, mobil umum, bemo, sepeda motor dan sebagainya.
- c.2. Jasa perbengkelan/reparsi lainnya seperti perbaikan/reparsi jam, televisi radio, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang-barang rumah tangga lainnya.
- c.3. Jasa pembantu rumah tangga, mencakup koki, tukang kebun, penjaga malam, pengasuh bayi dan anak, dan sejenisnya.
- c.4. Jasa perorangan lainnya, mencakup tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu, dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumah tangga diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output jasa pembantu rumah tangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk pembantu rumah tangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk jasa perorangan yang belum dicakup.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian rasio NTB dengan output, rasio NTB diperoleh dari hasil Survei Khusus Input-Output (SKIO). Sedangkan output dan NTB atas dasar konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi.



BAB V

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012

- 5.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
- 5.2 Struktur Perekonomian
- 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 5.4 Laju Pertumbuhan Sektoral
- 5.5 PDRB Per Kapita

BAB V TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan di suatu daerah sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan dan perbedaan sumber daya tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah.

Dengan disajikannya data PDRB menurut sektor secara berkala, dapat dilihat posisi serta kondisi perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu.

5.1 Besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Langkat pada tahun 2012 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan baik dengan minyak bumi maupun tanpa minyak bumi. Dengan minyak bumi PDRB Kabupaten Langkat pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 22.166.496,51 juta meningkat sebesar 13,30 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu Rp 19.565.250,18 juta, sedangkan tanpa minyak bumi meningkat sebesar 14,41 persen yaitu dari Rp 17.331.090,05 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 19.829.337,72 juta pada tahun 2012.

PDRB Kabupaten Langkat pada tahun 2012 atas dasar harga konstan 2000 juga mengalami peningkatan, baik dengan minyak bumi maupun tanpa minyak bumi. Dengan minyak bumi PDRB Kabupaten Langkat pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 8.058.645,95 juta meningkat sebesar 5,66 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu Rp 7.626.997,33 juta, sedangkan tanpa minyak bumi meningkat sebesar 6,05 persen yaitu dari Rp 7.114.973,11 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 7.545.541,68 juta pada tahun 2012.

Tabel 5.1.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000
Tahun 2000 – 2012 (Juta Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga konstan	
	Dengan Minyak Bumi	Tanpa Minyak Bumi	Dengan Minyak Bumi	Tanpa Minyak Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	5.106.391,96	4.144.789,71	5.106.391,96	4.144.789,71
2001	5.606.951,00	4.820.928,55	5.161.330,41	4.406.529,49
2002	6.001.491,93	5.284.047,64	5.319.844,04	4.569.590,67
2003	6.625.844,20	5.893.288,76	5.476.892,75	4.777.578,22
2004	7.361.460,24	6.619.699,17	5.532.162,67	4.989.367,44
2005	8.460.199,66	7.567.696,48	5.724.009,51	5.195.424,14
2006	9.892.655,63	8.670.624,99	5.895.132,56	5.416.770,79
2007	11.452.761,74	9.969.475,49	6.178.405,81	5.677.378,38
2008	13.241.169,62	11.592.120,85	6.491.865,73	6.023.345,96
2009	14.789.832,94	13.034.192,47	6.819.233,67	6.352.739,98
2010 ^r	17.037.979,50	15.078.992,03	7.210.562,22	6.722.626,48
2011*	19.565.250,18	17.331.090,05	7.626.997,33	7.114.973,11
2012**	22.166.496,51	19.829.337,72	8.058.645,95	7.545.541,68

Keterangan : r) Angka perbaikan,
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp 11.050.791,99 juta, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp 2.872.887,26 juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 2.432.003,39 juta, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 2.354.943,34 juta, sektor jasa-jasa sebesar Rp 1.552.050,36 juta, sektor bangunan sebesar Rp 707.601,50 juta, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 626.904,63 juta, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp 450.623,79 juta, dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp 118.690,25 juta.

PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2012, sektor yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp 4.378.099,67 juta, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 1.311.127,62 juta, sektor industri pengolahan sebesar Rp 868.055,31 juta, sektor jasa-jasa sebesar Rp 469.870,26 juta,

sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 437.469,58 juta, dan 4 (empat) sektor lainnya masing-masing di bawah Rp 300.000,00 juta.

Tabel 5.1.2
PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2011 dan 2012 (Jutaan rupiah)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Tahun 2011 *)	Tahun 2012 **)	Tahun 2011 *)	Tahun 2012 **)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Pertanian	9.691.306,30	11.050.791,99	4.157.064,51	4.378.099,67
2. Pertambangan dan Penggalian	2.189.983,44	2.354.943,34	432.164,06	437.469,58
3. Industri Pengolahan	2.569.551,97	2.872.887,26	827.543,41	868.055,31
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	104.292,58	118.690,25	27.209,15	28.849,40
5. Bangunan	559.609,54	707.601,50	188.002,94	218.155,36
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.168.455,03	2.432.003,39	1.246.376,48	1.311.127,62
7. Pengangkutan dan Komunikasi	543.295,73	626.904,63	171.877,01	182.252,68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	377.211,53	450.623,79	144.226,35	164.766,08
9. Jasa-jasa	1.361.544,04	1.552.050,36	432.533,42	469.870,26
PDRB	19.565.250,18	22.166.496,51	7.626.997,33	8.058.645,95

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

5.2 Struktur Perekonomian

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu wilayah. Struktur ekonomi ini menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, sekaligus menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan memproduksi barang dan jasa dari masing-masing sektor ekonomi. Pergeseran struktur ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan.

Untuk mengetahui gambaran tentang struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari persentase sektoral PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan yang dirinci menurut lapangan usaha. Sektor tersebut dibagi 3 sektor utama yaitu *sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier*. Sektor primer mencakup kegiatan pertanian dan penggalian. Sektor sekunder meliputi industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan. Sektor tersier meliputi perdagangan, hotel dan restoran,

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa perusahaan, persewaan bangunan dan jasa-jasa lainnya.

Secara umum ada empat kegiatan ekonomi yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Langkat yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan, dan penggalian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain secara berurutan sesuai dengan peranannya terhadap pembentukan total nilai PDRB adalah jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta listrik, gas dan air bersih.

Tabel 5.2.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

No.	Lapangan Usaha/ Sektor	Tahun				
		2008	2009	2010 ^r	2012 [*]	2012 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	48,71	49,15	49,27	49,53	49,85
2	Pertambangan dan Penggalian	11,57	11,34	11,19	11,19	10,62
3	Industri Pengolahan	14,10	13,79	13,54	13,13	12,96
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,56	0,56	0,54	0,53	0,54
5	Bangunan	2,59	2,67	2,73	2,86	3,19
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,40	11,16	11,27	11,08	10,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,75	2,79	2,82	2,78	2,83
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,80	1,89	1,91	1,93	2,03
9	Jasa-jasa	6,53	6,65	6,73	6,96	7,00
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Minyak Bumi		87,55	88,13	88,50	88,58	89,46
Minyak Bumi		12,45	11,87	11,50	11,42	10,54

Keterangan : r) Angka perbaikan,
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Dari tabel 5.2.1 di atas dapat dilihat bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Langkat. Pada tahun 2012 sektor pertanian sebesar 49,85 persen, kemudian disusul sektor Industri pengolahan sebesar 12,96 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,97 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,62 persen, sektor jasa-jasa 7,00 persen, sektor bangunan 3,19 persen, sektor pengangkutan

dan komunikasi 2,83 persen, sektor keuangan 2,03 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,54 persen.

Tabel 5.2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012

No.	Lapangan Usaha/ Sektor	Tahun				
		2008	2009	2010 ^r	2012 [*]	2012 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	54,72	54,89	54,66	54,50	54,33
2	Pertambangan dan Penggalian	6,05	5,78	5,71	5,67	5,43
3	Industri Pengolahan	11,01	10,92	10,87	10,85	10,77
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36
5	Bangunan	2,39	2,40	2,42	2,45	2,71
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,00	16,13	16,32	16,34	16,27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,26	2,24	2,25	2,25	2,26
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,68	1,76	1,82	1,89	2,04
9	Jasa-jasa	5,53	5,54	5,59	5,67	5,83
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Minyak Bumi		92,78	93,16	93,23	93,29	93,63
Minyak Bumi		7,22	6,84	6,77	6,71	6,77

Keterangan : r) Angka perbaikan,
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, yang dapat dilihat pada tabel 5.2.2, peranan sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar 54,33 persen disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,27 persen, sektor industri pengolahan sebesar 10,77 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,43 persen, sektor jasa-jasa sebesar 5,83 persen, sektor bangunan sebesar 2,71 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,26 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,04 persen, dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,36 persen.

5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi akibat adanya aktivitas ekonomi/pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi secara riil dapat dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya perlambatan perekonomian akibat menurunnya produksi barang/jasa di wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan.

Tabel 5.3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Langkat Tahun 2000-2012

Tahun	Termasuk Minyak Bumi		Tidak Termasuk Minyak Bumi	
	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000 ¹	5.106.391,96	-	4.144.789,71	-
2001	5.161.330,41	1,08	4.406.529,49	6,31
2002	5.319.844,04	3,07	4.569.590,67	3,70
2003	5.476.892,75	2,95	4.777.578,22	4,55
2004	5.532.162,67	1,01	4.989.367,44	4,43
2005	5.724.009,51	3,47	5.195.424,14	4,13
2006	5.895.132,56	2,99	5.416.770,79	4,26
2007	6.178.405,81	4,81	5.677.378,38	4,81
2008	6.491.865,74	5,07	6.023.345,97	6,09
2009	6.819.233,67	5,04	6.352.739,98	5,47
2010 ^r	7.210.562,22	5,74	6.722.626,48	5,82
2011 [*]	7.626.997,33	5,78	7.114.973,11	5,84
2012 ^{**}	8.058.645,95	5,66	7.545.541,68	6,05

Keterangan : 1) Tahun dasar
r) Angka perbaikan
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Dari tabel 5.3.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat sebesar 5,66 persen, sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 5,78 persen (dengan minyak bumi). Demikian juga tanpa minyak bumi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat sebesar 6,05 persen pada tahun 2012 mengalami perlambatan sedikit dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 5,84 persen.

Tabel 5.3.2 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 juga mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan tidak adanya fluktuasi harga produksi kecuali subsektor perkebunan terhadap nilai tambah semua sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan di Kabupaten Langkat sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan.

Tabel 5.3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Langkat Tahun 2000-2012

Tahun	Termasuk Minyak Bumi		Tidak Termasuk Minyak Bumi	
	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000 ¹	5.106.391,96	-	4.144.789,71	-
2001	5.606.951,00	9,80	4.820.928,55	16,31
2002	6.001.491,93	7,04	5.284.047,64	9,61
2003	6.625.844,20	10,40	5.893.288,76	11,53
2004	7.361.460,24	11,10	6.619.699,17	12,33
2005	8.460.199,66	14,93	7.567.696,48	14,32
2006	9.892.655,63	16,93	8.670.624,99	14,57
2007	11.452.761,74	15,77	9.969.475,49	14,98
2008	13.241.169,62	15,62	11.592.120,85	16,28
2009	14.789.832,94	11,70	13.034.192,47	12,44
2010 ^r	17.037.979,50	15,20	15.078.992,03	15,69
2011 [*]	19.565.250,18	14,83	17.331.090,05	14,94
2012 ^{**}	22.166.496,51	13,30	19.829.337,72	14,41

Keterangan : 1) Tahun dasar
r) Angka perbaikan
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

5.4 Laju Pertumbuhan Sektoral

Sektor bangunan merupakan sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 16,04 persen, disusul sektor-sektor lainnya antara lain sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 14,24 persen; sektor jasa-jasa sebesar 8,63 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 6,04 persen; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,03 persen; sektor pertanian sebesar 5,32 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,20 persen. Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar 4,90 persen dan 1,23 persen.

Tabel 5.4
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2008-2012 (%)

Termasuk Minyak Bumi

No.	Lapangan Usaha/ Sektor	Tahun					Sumber Pertumbuhan 2012*
		2008	2009	2010 ^r	2012*	2012**	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pertanian	6,07	5,36	5,30	5,47	5,32	2,90
2	Pertambangan dan Penggalian	-8,03	0,32	4,51	4,89	1,23	0,07
3	Industri Pengolahan	4,25	4,16	5,30	5,54	4,90	0,53
4	Listrik, Gas dan Air Minum	6,12	6,47	6,68	6,91	6,03	0,02
5	Bangunan	5,38	5,14	6,77	7,76	16,04	0,40
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,45	5,88	7,00	5,92	5,20	0,85
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,76	4,10	6,29	5,84	6,04	0,14
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,07	9,92	9,08	9,98	14,24	0,27
9	Jasa-jasa	5,00	5,19	6,74	7,35	8,63	0,49
PDRB		5,07	5,04	5,74	5,78	5,66	5,66
PDRB Tanpa Minyak Bumi		6,09	5,47	5,82	5,84	6,05	6,05
Minyak Bumi		-6,49	-0,43	4,60	4,94	0,21	0,21

Keterangan : r) Angka perbaikan

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Terhadap besarnya sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sebesar 5,66 persen, sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 2,90 persen, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,85 persen; sektor industri pengolahan sebesar 0,53 persen; sektor jasa-jasa sebesar 0,49 persen; sektor bangunan sebesar 0,40 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,27 persen; sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,14 persen; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,07 persen, serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,02 persen.

5.5 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Statistik ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran, walaupun ukuran ini belum dapat digunakan langsung sebagai ukuran tingkat pemerataan pendapatan. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB per kapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan, jadi besarnya PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Tabel 5.5
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Langkat
Tahun 2008-2012

Termasuk Minyak Bumi

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB (Jutaan Rp)	PDRB Per Kapita (Rp)	PDRB (Jutaan Rp)	PDRB Per Kapita (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	13.241.169,62	13.769.491,22	6.491.865,74	6.750.890,66
2009	14.789.832,94	15.329.540,05	6.819.233,67	7.068.079,55
2010 ^r	17.037.979,50	17.609.677,69	7.210.562,22	7.452.507,89
2011 [*]	19.565.250,18	20.034.354,59	7.626.997,33	7.809.865,32
2012 ^{**}	22.166.496,51	22.690.998,95	8.058.645,95	8.249.329,20

Keterangan : r) Angka perbaikan

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas dasar harga berlaku dan harga konstan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp 20.034.354,59 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 22.690.998,95 pada tahun 2012.

Untuk mengetahui PDRB per kapita riil dimana faktor kenaikan harga (inflasi) telah dihilangkan dapat dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 tahun 2011 sebesar Rp 7.809.865,32 meningkat menjadi Rp 8.249.329,20 pada tahun 2012.

Adanya peningkatan PDRB perkapita yang cukup tinggi setiap tahunnya di Kabupaten Langkat tentu saja sangat menggembirakan, namun angka tersebut belum dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi.



LAMPIRAN

Tabel Pokok PDRB Kabupaten Langkat Tahun 2008 – 2012

- Atas Dasar Harga Berlaku
- Atas Dasar Harga Konstan 2000

<https://langkat.bps.go.id>

TABEL 1.
PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2012
(JUTAAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 r)	2011 *)	2012 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	6,449,441.27	7,268,627.72	8,393,851.65	9,691,306.30	11,050,791.99
a. Tanaman Bahan Makanan	1,811,612.52	2,062,691.96	2,441,765.01	2,784,542.50	3,175,492.97
b. Tanaman Perkebunan	2,419,962.72	2,745,304.47	3,189,920.11	3,819,730.54	4,320,627.70
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	341,635.65	394,422.29	449,793.20	475,999.76	529,608.57
d. Kehutanan	1,155,592.22	1,283,576.38	1,433,405.52	1,671,430.49	2,012,238.18
e. Perikanan	720,638.16	782,632.62	878,967.82	939,603.01	1,012,824.57
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,532,313.23	1,677,422.99	1,906,657.61	2,189,983.44	2,354,943.34
a. Minyak dan Gas Bumi	1,169,399.01	1,258,719.40	1,412,002.24	1,617,977.80	1,674,187.92
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	362,914.22	418,703.59	494,655.37	572,005.64	680,755.43
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,866,504.75	2,039,084.92	2,307,779.58	2,569,551.97	2,872,887.26
a. Industri Migas	479,649.76	496,921.07	546,985.23	616,182.32	662,970.88
1). Pengilangan Minyak Bumi	479,649.76	496,921.07	546,985.23	616,182.32	662,970.88
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	1,386,855.00	1,542,163.85	1,760,794.35	1,953,369.65	2,209,916.38
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	443,313.69	498,977.88	587,198.29	643,306.72	713,810.82
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	567,330.41	630,493.83	693,112.80	752,474.53	861,281.29
4). Kertas & Barang Cetak	11,784.59	13,214.43	15,215.28	17,703.43	20,080.72
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	309,052.83	338,982.02	398,244.57	463,687.37	526,871.39
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	48,836.93	53,261.75	58,946.63	66,180.97	76,252.87
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	-
9). Barang Lainnya	6,536.54	7,233.94	8,076.77	10,016.63	11,619.29
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	73,749.74	82,804.99	92,667.51	104,292.58	118,690.25
a. Listrik	67,269.98	75,785.30	84,979.26	95,928.33	109,479.45
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	6,479.76	7,019.69	7,688.25	8,364.24	9,210.79
5. BANGUNAN	343,253.95	395,623.07	465,210.80	559,609.54	707,601.50
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,509,644.02	1,651,016.33	1,920,038.53	2,168,455.03	2,432,003.39
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,508,781.57	1,650,092.35	1,919,032.99	2,167,338.76	2,430,787.04
b. Hotel	772.73	820.35	887.08	985.63	1,067.00
c. Restoran	89.71	103.64	118.46	130.64	149.35
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	363,558.73	411,933.51	480,459.38	543,295.73	626,904.63
a. Pengangkutan	308,085.99	347,264.52	407,274.93	459,929.51	529,952.66
1). Angkutan Rel	564.52	609.78	612.68	601.51	531.49
2). Angkutan Jalan Raya	123,565.37	138,762.71	166,070.66	191,238.55	222,913.01
3). Angkutan Laut	109,083.84	123,897.45	141,005.47	154,485.80	175,586.47
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	11,739.77	13,279.90	15,636.58	17,634.16	19,595.73
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	63,132.49	70,714.67	83,949.53	95,969.48	111,325.97
b. Komunikasi	55,472.74	64,668.99	73,184.46	83,366.23	96,951.97
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	238,430.73	279,631.39	325,011.22	377,211.53	450,623.79
a. Bank	71,070.45	92,647.00	111,620.12	133,593.24	170,984.24
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	42,289.84	47,782.04	55,081.67	62,381.29	69,368.55
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	99,836.58	110,587.97	124,226.77	141,191.29	164,549.79
e. Jasa Perusahaan	25,233.86	28,614.37	34,082.66	40,045.71	45,721.21
9. JASA-JASA	864,273.21	983,688.00	1,146,303.23	1,361,544.04	1,552,050.36
a. Pemerintahan	475,975.38	545,765.46	652,565.99	791,834.85	915,071.96
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	287,555.52	329,640.32	394,631.30	475,636.87	550,263.22
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	188,419.86	216,125.13	257,934.68	316,197.98	364,808.73
b. S w a s t a	388,297.83	437,922.55	493,737.24	569,709.20	636,978.41
1). Sosial kemasyarakatan	163,001.47	180,741.09	200,084.15	227,468.62	248,014.39
2). Hiburan dan Rekreasi	12,624.25	13,553.75	14,730.65	16,520.17	18,030.02
3). Perorangan & Rumah Tangga	212,672.11	243,627.71	278,922.43	325,720.42	370,934.00
PDRB	13,241,169.62	14,789,832.94	17,037,979.50	19,565,250.18	22,166,496.51
PDRB TANPA MIGAS	11,592,120.85	13,034,192.47	15,078,992.03	17,331,090.05	19,829,337.72
PDRB Perkapita (Rupiah)	13,769,491.22	15,329,540.05	17,609,677.69	20,034,354.59	22,690,998.95

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 2.
PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2012
(JUTAAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	3,552,464.80	3,742,778.48	3,941,301.79	4,157,064.51	4,378,099.67
a. Tanaman Bahan Makanan	1,030,069.75	1,094,216.51	1,163,327.19	1,237,118.94	1,306,514.14
b. Tanaman Perkebunan	1,030,387.41	1,085,152.78	1,155,149.14	1,247,194.79	1,334,944.22
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	197,501.29	208,223.07	220,525.69	235,147.54	250,937.66
d. Kehutanan	924,758.25	978,073.02	1,013,818.33	1,037,850.20	1,074,171.79
e. Perikanan	369,748.09	377,113.11	388,481.44	399,753.04	411,531.87
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	392,989.16	394,263.81	412,028.76	432,164.06	437,469.58
a. Minyak dan Gas Bumi	349,689.34	347,818.72	362,188.53	378,424.01	377,766.55
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	43,299.82	46,445.09	49,840.23	53,740.05	59,703.03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	714,930.47	744,704.13	784,137.99	827,543.41	868,055.31
a. Industri Migas	118,830.43	118,674.96	125,747.20	133,600.21	135,337.73
1). Pengilangan Minyak Bumi	118,830.43	118,674.96	125,747.20	133,600.21	135,337.73
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	596,100.04	626,029.17	658,390.79	693,943.21	732,717.58
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	221,396.35	232,116.26	246,537.15	261,255.69	277,195.07
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	244,382.06	256,887.18	266,951.48	279,412.47	294,036.18
4). Kertas & Barang Cetak	5,504.76	5,833.23	6,141.25	6,454.50	6,832.05
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	107,586.47	113,091.70	119,630.42	126,676.31	133,215.30
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	14,406.04	15,130.12	15,985.58	16,843.24	17,959.94
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	-
9). Barang Lainnya	2,824.36	2,970.67	3,144.91	3,301.01	3,479.04
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	22,406.43	23,856.82	25,449.42	27,209.15	28,849.40
a. Listrik	19,852.67	21,212.86	22,685.03	24,315.97	25,798.65
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2,553.76	2,643.97	2,764.39	2,893.18	3,050.75
5. BANGUNAN	155,408.56	163,402.99	174,458.41	188,002.94	218,155.36
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,038,665.22	1,099,716.26	1,176,729.74	1,246,376.48	1,311,127.62
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,038,096.02	1,099,134.44	1,176,134.45	1,245,765.45	1,310,486.76
b. Hotel	538.23	549.25	561.00	573.90	599.29
c. Restoran	30.96	32.58	34.29	37.12	41.56
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	146,758.01	152,781.49	162,387.28	171,877.01	182,252.68
a. Pengangkutan	119,515.99	123,309.47	129,747.20	136,069.26	142,889.79
1). Angkutan Rel	160.58	159.74	160.50	153.58	132.35
2). Angkutan Jalan Raya	47,732.54	49,099.94	52,130.77	55,183.53	59,008.25
3). Angkutan Laut	42,565.42	44,075.32	46,041.08	47,565.87	48,464.09
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	4,673.97	4,838.93	5,024.26	5,209.59	5,357.43
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	24,383.48	25,135.54	26,390.59	27,956.68	29,927.67
b. Komunikasi	27,242.01	29,472.01	32,640.08	35,807.75	39,362.88
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	109,373.21	120,220.11	131,133.18	144,226.35	164,766.08
a. Bank	33,196.53	39,781.57	45,547.75	52,583.34	64,315.59
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	17,854.68	18,846.35	20,320.14	21,793.94	23,907.94
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	52,514.38	55,439.58	58,586.02	62,640.24	68,676.73
e. Jasa Perusahaan	5,807.62	6,152.61	6,679.27	7,208.83	7,865.82
9. JASA-JASA	358,869.89	377,509.57	402,935.64	432,533.42	469,870.26
a. Pemerintahan	222,324.90	233,572.48	250,413.52	270,774.02	295,933.29
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	134,315.25	141,076.92	151,300.84	164,014.28	179,395.93
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	88,009.65	92,495.56	99,112.68	106,759.74	116,537.35
b. S w a s t a	136,544.99	143,937.08	152,522.12	161,759.40	173,936.97
1). Sosial kemasyarakatan	41,906.30	43,684.70	45,571.88	47,867.70	50,951.34
2). Hiburan dan Rekreasi	8,540.62	8,857.90	9,213.10	9,759.28	10,404.83
3). Perorangan & Rumah Tangga	86,098.08	91,394.48	97,737.14	104,132.42	112,580.80
P D R B	6,491,865.74	6,819,233.67	7,210,562.22	7,626,997.33	8,058,645.95
PDRB TANPA MIGAS	6,023,345.97	6,352,739.98	6,722,626.48	7,114,973.11	7,545,541.68
PDRB Perkapita (Rupiah)	6,750,890.66	7,068,079.55	7,452,507.89	7,809,865.32	8,249,329.20

Calatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

TABEL 3.
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2012
(PERSENTASE)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	48.71	49.15	49.27	49.53	49.85
a. Tanaman Bahan Makanan	13.68	13.95	14.33	14.23	14.33
b. Tanaman Perkebunan	18.28	18.56	18.72	19.52	19.49
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.58	2.67	2.64	2.43	2.39
d. Kehutanan	8.73	8.68	8.41	8.54	9.08
e. Perikanan	5.44	5.29	5.16	4.80	4.57
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	11.57	11.34	11.19	11.19	10.62
a. Minyak dan Gas Bumi	8.83	8.51	8.29	8.27	7.55
b. Pertambangan Tanpa Migas					
c. Penggalian	2.74	2.83	2.90	2.92	3.07
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	14.10	13.79	13.54	13.13	12.96
a. Industri Migas	3.62	3.36	3.21	3.15	2.99
1). Pengilangan Minyak Bumi	3.62	3.36	3.21	3.15	2.99
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	10.47	10.43	10.33	9.98	9.97
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	3.35	3.37	3.45	3.29	3.22
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	4.28	4.26	4.07	3.85	3.89
4). Kertas & Barang Cetak	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	2.33	2.29	2.34	2.37	2.38
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	-
9). Barang Lainnya	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	0.56	0.56	0.54	0.53	0.54
a. Listrik	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
5. BANGUNAN	2.59	2.67	2.73	2.86	3.19
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	11.40	11.16	11.27	11.08	10.97
a. Perdagangan Besar & Eceran	11.39	11.16	11.26	11.08	10.97
b. Hotel	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
c. Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.75	2.79	2.82	2.78	2.83
a. Pengangkutan	2.33	2.35	2.39	2.35	2.39
1). Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2). Angkutan Jalan Raya	0.93	0.94	0.97	0.98	1.01
3). Angkutan Laut	0.82	0.84	0.83	0.79	0.79
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	0.48	0.48	0.49	0.49	0.50
b. Komunikasi	0.42	0.44	0.43	0.43	0.44
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.80	1.89	1.91	1.93	2.03
a. Bank	0.54	0.63	0.66	0.68	0.77
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	0.75	0.75	0.73	0.72	0.74
e. Jasa Perusahaan	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21
9. JASA-JASA	6.53	6.65	6.73	6.96	7.00
a. Pemerintahan	3.59	3.69	3.83	4.05	4.13
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	2.17	2.23	2.32	2.43	2.48
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	1.42	1.46	1.51	1.62	1.65
b. S w a s t a	2.93	2.96	2.90	2.91	2.87
1). Sosial kemasyarakatan	1.23	1.22	1.17	1.16	1.12
2). Hiburan dan Rekreasi	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08
3). Perorangan & Rumah Tangga	1.61	1.65	1.64	1.66	1.67
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	87.55	88.13	88.50	88.58	89.46
PDRB Perkapita (Rupiah)	-	-	-	-	-

Calatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

TABEL 4.
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2012
(PERSENTASE)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	54.72	54.89	54.66	54.50	54.33
a. Tanaman Bahan Makanan	15.87	16.05	16.13	16.22	16.21
b. Tanaman Perkebunan	15.87	15.91	16.02	16.35	16.57
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3.04	3.05	3.06	3.08	3.11
d. Kehutanan	14.24	14.34	14.06	13.61	13.33
e. Perikanan	5.70	5.53	5.39	5.24	5.11
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6.05	5.78	5.71	5.67	5.43
a. Minyak dan Gas Bumi	5.39	5.10	5.02	4.96	4.69
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	0.67	0.68	0.69	0.70	0.74
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	11.01	10.92	10.87	10.85	10.77
a. Industri Migas	1.83	1.74	1.74	1.75	1.68
1). Pengilangan Minyak Bumi	1.83	1.74	1.74	1.75	1.68
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	9.18	9.18	9.13	9.10	9.09
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	3.41	3.40	3.42	3.43	3.44
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	3.76	3.77	3.70	3.66	3.65
4). Kertas & Barang Cetak	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	1.66	1.66	1.66	1.66	1.65
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	-
9). Barang Lainnya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36
a. Listrik	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
5. BANGUNAN	2.39	2.40	2.42	2.46	2.71
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	16.00	16.13	16.32	16.34	16.27
a. Perdagangan Besar & Eceran	15.99	16.12	16.31	16.33	16.26
b. Hotel	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
c. Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.26	2.24	2.25	2.25	2.26
a. Pengangkutan	1.84	1.81	1.80	1.78	1.77
1). Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2). Angkutan Jalan Raya	0.74	0.72	0.72	0.72	0.73
3). Angkutan Laut	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37
b. Komunikasi	0.42	0.43	0.45	0.47	0.49
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.68	1.76	1.82	1.89	2.04
a. Bank	0.51	0.58	0.63	0.69	0.80
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.28	0.28	0.28	0.29	0.30
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	0.81	0.81	0.81	0.82	0.85
e. Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
9. JASA-JASA	5.53	5.54	5.59	5.67	5.83
a. Pemerintahan	3.42	3.43	3.47	3.55	3.67
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	2.07	2.07	2.10	2.15	2.23
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	1.36	1.36	1.37	1.40	1.45
b. S w a s t a	2.10	2.11	2.12	2.12	2.16
1). Sosial kemasyarakatan	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63
2). Hiburan dan Rekreasi	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
3). Perorangan & Rumah Tangga	1.33	1.34	1.36	1.37	1.40
P D R B	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	92.78	93.16	93.23	93.29	93.63
PDRB Perkapita (Rupiah)	-	-	-	-	-

Calatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

TABEL 5.
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2012
(PERSENTASE)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	15.36	12.70	15.48	15.46	14.03
a. Tanaman Bahan Makanan	15.43	13.86	18.38	14.04	14.04
b. Tanaman Perkebunan	16.88	13.44	16.20	19.74	13.11
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	13.78	15.45	14.04	5.83	11.26
d. Kehutanan	15.13	11.08	11.67	16.61	20.39
e. Perikanan	11.44	8.60	12.31	6.90	7.79
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	11.02	9.47	13.67	14.86	7.53
a. Minyak dan Gas Bumi	5.91	7.64	12.18	14.59	3.47
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	31.48	15.37	18.14	15.64	19.01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	19.32	9.25	13.18	11.34	11.80
a. Industri Migas	26.51	3.60	10.07	12.65	7.59
1). Pengilangan Minyak Bumi	26.51	3.60	10.07	12.65	7.59
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	17.01	11.20	14.18	10.94	13.13
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	17.19	12.56	17.68	9.56	10.96
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	15.88	11.13	9.93	8.56	14.46
4). Kertas & Barang Cetak	18.13	12.13	15.14	16.35	13.43
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	18.72	9.68	17.48	16.43	13.63
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	17.95	9.06	10.67	12.27	15.22
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	16.08	10.67	11.65	24.02	16.00
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	24.48	12.28	11.91	12.54	13.81
a. Listrik	25.31	12.66	12.13	12.88	14.13
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	16.39	8.33	9.52	8.79	10.12
5. BANGUNAN	17.31	15.26	17.59	20.29	26.45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	13.77	9.36	16.29	12.94	12.15
a. Perdagangan Besar & Eceran	13.77	9.37	16.30	12.94	12.16
b. Hotel	4.24	6.16	8.13	11.11	8.26
c. Restoran	19.54	15.52	14.30	10.29	14.32
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	17.19	13.31	16.64	13.08	15.39
a. Pengangkutan	15.40	12.72	17.28	12.93	15.22
1). Angkutan Rel	19.63	8.02	0.48	(1.82)	(11.64)
2). Angkutan Jalan Raya	14.05	12.30	19.68	15.15	16.56
3). Angkutan Laut	17.57	13.58	13.81	9.56	13.66
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	17.18	13.12	17.75	12.78	11.12
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	14.06	12.01	18.72	14.32	16.00
b. Komunikasi	28.19	16.58	13.17	13.91	16.30
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	22.24	17.28	16.23	16.06	19.46
a. Bank	53.72	30.36	20.48	19.69	27.99
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	17.48	12.99	15.28	13.25	11.20
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	6.46	10.77	12.33	13.66	16.54
e. Jasa Perusahaan	32.52	13.40	19.11	17.50	14.17
9. JASA-JASA	17.81	13.82	16.53	18.78	13.99
a. Pemerintahan	15.56	14.66	19.57	21.34	15.56
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	14.42	14.64	19.72	20.53	15.69
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	17.35	14.70	19.35	22.59	15.37
b. S w a s t a	20.68	12.78	12.75	15.39	11.81
1). Sosial kemasyarakatan	23.52	10.88	10.70	13.69	9.03
2). Hiburan dan Rekreasi	5.54	7.36	8.68	12.15	9.14
3). Perorangan & Rumah Tangga	19.60	14.56	14.49	16.78	13.88
PDRB	15.62	11.70	15.20	14.83	13.30
PDRB TANPA MIGAS	16.28	12.44	15.69	14.94	14.41
PDRB Perkapita (Rupiah)	15.21	11.33	14.87	13.77	13.26

Calatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

TABEL 6.
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2012
(PERSENTASE)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	6.07	5.36	5.30	5.47	5.32
a. Tanaman Bahan Makanan	6.36	6.23	6.32	6.34	5.61
b. Tanaman Perkebunan	3.82	5.32	6.45	7.97	7.04
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4.96	5.43	5.91	6.63	6.71
d. Kehutanan	10.73	5.77	3.65	2.37	3.50
e. Perikanan	1.29	1.99	3.01	2.90	2.95
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	(8.03)	0.32	4.51	4.89	1.23
a. Minyak dan Gas Bumi	(9.08)	(0.53)	4.13	4.48	(0.17)
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	1.45	7.26	7.31	7.82	11.10
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4.25	4.16	5.30	5.54	4.90
a. Industri Migas	2.09	(0.13)	5.96	6.25	1.30
1). Pengilangan Minyak Bumi	2.09	(0.13)	5.96	6.25	1.30
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	4.69	5.02	5.17	5.40	5.59
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	4.28	4.84	6.21	5.97	6.10
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	4.99	5.12	3.92	4.67	5.23
4). Kertas & Barang Cetak	5.75	5.97	5.28	5.10	5.85
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	4.69	5.12	5.78	5.89	5.16
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	5.23	5.03	5.65	5.37	6.63
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	5.74	5.18	5.87	4.96	5.39
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	6.12	6.47	6.68	6.91	6.03
a. Listrik	6.54	6.85	6.94	7.19	6.10
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2.97	3.53	4.55	4.66	5.45
5. BANGUNAN	5.38	5.14	6.77	7.76	16.04
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	7.45	5.88	7.00	5.92	5.20
a. Perdagangan Besar & Eceran	7.46	5.88	7.01	5.92	5.20
b. Hotel	(1.25)	2.05	2.14	2.30	4.42
c. Restoran	3.78	5.23	5.25	8.26	11.96
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.76	4.10	6.29	5.84	6.04
a. Pengangkutan	1.32	3.17	5.22	4.87	5.01
1). Angkutan Rel	(0.16)	(0.52)	0.48	(4.31)	(13.83)
2). Angkutan Jalan Raya	0.09	2.86	6.17	5.86	6.93
3). Angkutan Laut	3.26	3.55	4.46	3.31	1.89
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	3.24	3.53	3.83	3.69	2.84
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	0.10	3.08	4.99	5.93	7.05
b. Komunikasi	16.02	8.19	10.75	9.70	9.93
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	12.07	9.92	9.08	9.98	14.24
a. Bank	39.67	19.84	14.49	15.45	22.31
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.15	5.55	7.82	7.25	9.70
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	1.86	5.57	5.68	6.92	9.64
e. Jasa Perusahaan	9.85	5.94	8.56	7.93	9.11
9. JASA-JASA	5.00	5.19	6.74	7.35	8.63
a. Pemerintahan	5.00	5.06	7.21	8.13	9.29
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	3.96	5.03	7.25	8.40	9.38
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	6.62	5.10	7.15	7.72	9.16
b. Swasta	5.00	5.41	5.96	6.06	7.53
1). Sosial kemasyarakatan	3.66	4.24	4.32	5.04	6.44
2). Hiburan dan Rekreasi	(0.02)	3.72	4.01	5.93	6.61
3). Perorangan & Rumah Tangga	6.19	6.15	6.94	6.54	8.11
PDRB	5.07	5.04	5.74	5.78	5.66
PDRB TANPA MIGAS	6.09	5.47	5.82	5.84	6.05
PDRB Perkapita (Rupiah)	4.71	4.70	5.44	4.80	5.63

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
) Angka Sangat Sementara

TABEL 7.
INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2012
(TAHUN DASAR = 100)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	115.36	112.70	115.48	115.46	114.03
a. Tanaman Bahan Makanan	115.43	113.86	118.38	114.04	114.04
b. Tanaman Perkebunan	116.88	113.44	116.20	119.74	113.11
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	113.78	115.45	114.04	105.83	111.26
d. Kehutanan	115.13	111.08	111.67	116.61	120.39
e. Perikanan	111.44	108.60	112.31	106.90	107.79
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	111.02	109.47	113.67	114.86	107.53
a. Minyak dan Gas Bumi	105.91	107.64	112.18	114.59	103.47
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	131.48	115.37	118.14	115.64	119.01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	119.32	109.25	113.18	111.34	111.80
a. Industri Migas	126.51	103.60	110.07	112.65	107.59
1). Pengilangan Minyak Bumi	126.51	103.60	110.07	112.65	107.59
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	117.01	111.20	114.18	110.94	113.13
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	117.19	112.56	117.68	109.56	110.96
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	115.88	111.13	109.93	108.56	114.46
4). Kertas & Barang Cetak	118.13	112.13	115.14	116.35	113.43
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	118.72	109.68	117.48	116.43	113.63
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	117.95	109.06	110.67	112.27	115.22
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	116.08	110.67	111.65	124.02	116.00
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	124.48	112.28	111.91	112.54	113.81
a. Listrik	125.31	112.66	112.13	112.88	114.13
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	116.39	108.33	109.52	108.79	110.12
5. BANGUNAN	117.31	115.26	117.59	120.29	126.45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	113.77	109.36	116.29	112.94	112.15
a. Perdagangan Besar & Eceran	113.77	109.37	116.30	112.94	112.16
b. Hotel	104.24	106.16	108.13	111.11	108.26
c. Restoran	119.54	115.52	114.30	110.29	114.32
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	117.19	113.31	116.64	113.08	115.39
a. Pengangkutan	115.40	112.72	117.28	112.93	115.22
1). Angkutan Rel	119.63	108.02	100.48	98.18	88.36
2). Angkutan Jalan Raya	114.05	112.30	119.68	115.15	116.56
3). Angkutan Laut	117.57	113.58	113.81	109.56	113.66
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	117.18	113.12	117.75	112.78	111.12
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	114.06	112.01	118.72	114.32	116.00
b. Komunikasi	128.19	116.58	113.17	113.91	116.30
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	122.24	117.28	116.23	116.06	119.46
a. Bank	153.72	130.36	120.48	119.69	127.99
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	117.48	112.99	115.28	113.25	111.20
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	106.46	110.77	112.33	113.66	116.54
e. Jasa Perusahaan	132.52	113.40	119.11	117.50	114.17
9. JASA-JASA	117.81	113.82	116.53	118.78	113.99
a. Pemerintahan	115.56	114.66	119.57	121.34	115.56
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	114.42	114.64	119.72	120.53	115.69
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	117.35	114.70	119.35	122.59	115.37
b. Swasta	120.68	112.78	112.75	115.39	111.81
1). Sosial kemasyarakatan	123.52	110.88	110.70	113.69	109.03
2). Hiburan dan Rekreasi	105.54	107.36	108.68	112.15	109.14
3). Perorangan & Rumah Tangga	119.60	114.56	114.49	116.78	113.88
PDRB	115.62	111.70	115.20	114.83	113.30
PDRB TANPA MIGAS	116.28	112.44	115.69	114.94	114.41
PDRB Perkapita (Rupiah)	115.21	111.33	114.87	113.77	113.26

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 8.
INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2012
(TAHUN DASAR = 100)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	106.07	105.36	105.30	105.47	105.32
a. Tanaman Bahan Makanan	106.36	106.23	106.32	106.34	105.61
b. Tanaman Perkebunan	103.82	105.32	106.45	107.97	107.04
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	104.96	105.43	105.91	106.63	106.71
d. Kehutanan	110.73	105.77	103.65	102.37	103.50
e. Perikanan	101.29	101.99	103.01	102.90	102.95
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	91.97	100.32	104.51	104.89	101.23
a. Minyak dan Gas Bumi	90.92	99.47	104.13	104.48	99.83
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	101.45	107.26	107.31	107.82	111.10
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	104.25	104.16	105.30	105.54	104.90
a. Industri Migas	102.09	99.87	105.96	106.25	101.30
1). Pengilangan Minyak Bumi	102.09	99.87	105.96	106.25	101.30
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	104.69	105.02	105.17	105.40	105.59
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	104.28	104.84	106.21	105.97	106.10
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hulan Lainnya	104.99	105.12	103.92	104.67	105.23
4). Kertas & Barang Cetak	105.75	105.97	105.28	105.10	105.85
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	104.69	105.12	105.78	105.89	105.16
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	105.23	105.03	105.65	105.37	106.63
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	105.74	105.18	105.87	104.96	105.39
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	106.12	106.47	106.68	106.91	106.03
a. Listrik	106.54	106.85	106.94	107.19	106.10
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	102.97	103.53	104.55	104.66	105.45
5. BANGUNAN	105.38	105.14	106.77	107.76	116.04
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	107.45	105.88	107.00	105.92	105.20
a. Perdagangan Besar & Eceran	107.46	105.88	107.01	105.92	105.20
b. Hotel	98.75	102.05	102.14	102.30	104.42
c. Restoran	103.78	105.23	105.25	108.26	111.96
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	103.76	104.10	106.29	105.84	106.04
a. Pengangkutan	101.32	103.17	105.22	104.87	105.01
1). Angkutan Rel	99.84	99.48	100.48	95.69	86.17
2). Angkutan Jalan Raya	100.09	102.86	106.17	105.86	106.93
3). Angkutan Laut	103.26	103.55	104.46	103.31	101.89
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	103.24	103.53	103.83	103.69	102.84
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	100.10	103.08	104.99	105.93	107.05
b. Komunikasi	116.02	108.19	110.75	109.70	109.93
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	112.07	109.92	109.08	109.98	114.24
a. Bank	139.67	119.84	114.49	115.45	122.31
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	105.15	105.55	107.82	107.25	109.70
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	101.86	105.57	105.68	106.92	109.64
e. Jasa Perusahaan	109.85	105.94	108.56	107.93	109.11
9. JASA-JASA	105.00	105.19	106.74	107.35	108.63
a. Pemerintahan	105.00	105.06	107.21	108.13	109.29
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	103.96	105.03	107.25	108.40	109.38
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	106.62	105.10	107.15	107.72	109.16
b. Swasta	105.00	105.41	105.96	106.06	107.53
1). Sosial kemasyarakatan	103.66	104.24	104.32	105.04	106.44
2). Hiburan dan Rekreasi	99.98	103.72	104.01	105.93	106.61
3). Perorangan & Rumah Tangga	106.19	106.15	106.94	106.54	108.11
PDRB	105.07	105.04	105.74	105.78	105.66
PDRB TANPA MIGAS	106.09	105.47	105.82	105.84	106.05
PDRB Perkapita (Rupiah)	104.71	104.70	105.44	104.80	105.63

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 9.
 INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008-2012
 (TAHUN DASAR = 100)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	261.38	294.57	340.18	392.76	447.85
a. Tanaman Bahan Makanan	259.90	295.92	350.30	399.47	455.56
b. Tanaman Perkebunan	287.02	325.60	378.34	453.04	512.45
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	230.71	266.36	303.75	321.45	357.65
d. Kehutanan	281.44	312.61	349.11	407.08	490.08
e. Perikanan	195.49	212.31	238.44	254.89	274.76
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	167.68	183.55	208.64	239.64	257.69
a. Minyak dan Gas Bumi	134.24	144.50	162.09	185.74	192.19
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	849.03	979.55	1,157.24	1,338.20	1,592.62
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	370.42	404.67	458.00	509.95	570.15
a. Industri Migas	530.05	549.14	604.46	680.93	732.64
1). Pengilangan Minyak Bumi	530.05	549.14	604.46	680.93	732.64
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	335.48	373.05	425.94	472.52	534.58
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	289.29	325.61	383.18	419.79	465.80
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	335.24	372.56	409.57	444.64	508.94
4). Kertas & Barang Cetak	297.39	333.47	383.96	446.75	506.74
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	414.38	454.51	533.97	621.72	706.43
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	471.96	514.72	569.66	639.57	736.91
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	322.61	357.03	398.63	494.37	573.47
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	517.18	580.68	649.84	731.36	832.33
a. Listrik	561.78	632.89	709.67	801.11	914.28
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	283.50	307.12	336.37	365.95	402.98
5. BANGUNAN	294.32	339.22	398.89	479.83	606.73
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	241.95	264.61	307.72	347.53	389.77
a. Perdagangan Besar & Eceran	242.14	264.82	307.98	347.83	390.12
b. Hotel	92.35	98.04	106.01	117.79	127.52
c. Restoran	389.95	450.47	514.90	567.86	649.17
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	293.14	332.15	387.40	438.06	505.48
a. Pengangkutan	267.85	301.91	354.08	399.86	460.74
1). Angkutan Rel	329.05	355.43	357.12	350.61	309.80
2). Angkutan Jalan Raya	243.97	273.97	327.89	377.58	440.12
3). Angkutan Laut	309.81	351.88	400.47	438.75	498.68
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	303.21	342.99	403.86	455.45	506.12
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	251.32	281.50	334.19	382.04	443.17
b. Komunikasi	616.40	718.58	813.21	926.34	1,077.30
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	408.20	478.74	556.43	645.80	771.48
a. Bank	3,176.81	4,141.26	4,989.35	5,971.53	7,642.89
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	477.92	539.99	622.49	704.98	783.94
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	220.30	244.02	274.11	311.55	363.09
e. Jasa Perusahaan	1,258.70	1,427.32	1,700.09	1,997.53	2,280.63
9. JASA-JASA	304.45	346.51	403.80	479.62	546.72
a. Pemerintahan	267.66	306.90	366.96	445.28	514.58
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	248.25	284.58	340.69	410.62	475.04
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	303.93	348.62	416.06	510.04	588.45
b. Swasta	366.14	412.93	465.56	537.19	600.62
1). Sosial kemasyarakatan	456.15	505.79	559.92	636.55	694.05
2). Hiburan dan Rekreasi	129.51	139.04	151.12	169.48	184.97
3). Perorangan & Rumah Tangga	351.11	402.22	460.49	537.75	612.40
PDRB	259.31	289.63	333.66	383.15	434.09
PDRB TANPA MIGAS	279.68	314.47	363.81	418.14	478.42
PDRB Perkapita (Rupiah)	244.46	272.15	312.63	355.68	402.85

Catatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 10.
INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2008-2012
(TAHUN DASAR = 100)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	143.97	151.68	159.73	168.47	177.43
a. Tanaman Bahan Makanan	147.77	156.98	166.89	177.48	187.43
b. Tanaman Perkebunan	122.21	128.70	137.01	147.92	158.33
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	133.37	140.61	148.92	158.80	169.46
d. Kehutanan	225.22	238.21	246.92	252.77	261.61
e. Perikanan	100.30	102.30	105.39	108.44	111.64
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	43.00	43.14	45.09	47.29	47.87
a. Minyak dan Gas Bumi	40.14	39.93	41.58	43.44	43.37
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	101.30	108.66	116.60	125.72	139.67
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	141.88	147.79	155.62	164.23	172.27
a. Industri Migas	131.32	131.15	138.96	147.64	149.56
1). Pengilangan Minyak Bumi	131.32	131.15	138.96	147.64	149.56
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	144.20	151.44	159.26	167.86	177.24
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	144.47	151.47	160.88	170.48	180.88
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	144.41	151.80	157.74	165.11	173.75
4). Kertas & Barang Cetak	138.91	147.20	154.98	162.88	172.41
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	144.25	151.63	160.40	169.85	178.62
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	139.22	146.22	154.48	162.77	173.56
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	139.40	146.62	155.22	162.92	171.71
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	157.13	167.30	178.47	190.81	202.31
a. Listrik	165.79	177.15	189.45	203.07	215.45
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	111.73	115.68	120.95	126.58	133.47
5. BANGUNAN	133.25	140.11	149.59	161.20	187.06
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	171.03	181.09	193.77	205.24	215.90
a. Perdagangan Besar & Eceran	171.18	181.25	193.94	205.43	216.10
b. Hotel	64.32	65.64	67.04	68.59	71.62
c. Restoran	134.57	141.61	149.05	161.35	180.66
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	118.33	123.19	130.93	138.59	146.95
a. Pengangkutan	103.91	107.20	112.80	118.30	124.23
1). Angkutan Rel	93.60	93.11	93.55	89.52	77.14
2). Angkutan Jalan Raya	94.24	96.94	102.93	108.95	116.50
3). Angkutan Laut	120.89	125.18	130.76	135.09	137.64
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	120.72	124.98	129.77	134.55	138.37
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	97.07	100.06	105.06	111.29	119.14
b. Komunikasi	302.71	327.49	362.69	397.89	437.39
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	187.25	205.82	224.50	246.92	282.09
a. Bank	1,483.86	1,778.21	2,035.96	2,350.44	2,874.87
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	201.78	212.99	229.64	246.30	270.19
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	115.88	122.33	129.27	138.22	151.54
e. Jasa Perusahaan	289.69	306.90	333.17	359.59	392.36
9. JASA-JASA	126.41	132.98	141.94	152.36	165.52
a. Pemerintahan	125.02	131.35	140.82	152.27	166.41
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	115.95	121.79	130.62	141.59	154.87
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	141.96	149.20	159.87	172.21	187.98
b. S w a s t a	128.75	135.72	143.82	152.53	164.01
1). Sosial kemasyarakatan	117.27	122.25	127.53	133.95	142.58
2). Hiburan dan Rekreasi	87.62	90.87	94.51	100.12	106.74
3). Perorangan & Rumah Tangga	142.14	150.89	161.36	171.92	185.87
P D R B	127.55	133.98	141.67	149.85	158.33
PDRB TANPA MIGAS	145.91	153.89	162.85	172.35	182.78
PDRB Perkapita (Rupiah)	120.24	125.89	132.74	139.11	146.93

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 11.
INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008-2012
(TAHUN DASAR = 100)

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
1. PERTANIAN	181.55	194.20	212.97	233.13	252.41
a. Tanaman Bahan Makanan	175.87	188.51	209.89	225.08	243.05
b. Tanaman Perkebunan	234.86	252.99	276.15	306.27	323.66
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	172.98	189.42	203.96	202.43	211.05
d. Kehutanan	124.96	131.24	141.39	161.05	187.33
e. Perikanan	194.90	207.53	226.26	235.05	246.11
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	389.91	425.46	462.75	506.75	538.31
a. Minyak dan Gas Bumi	334.41	361.89	389.85	427.56	443.18
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	838.14	901.50	992.48	1,064.39	1,140.24
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	261.08	273.81	294.31	310.50	330.96
a. Industri Migas	403.64	418.72	434.99	461.21	489.86
1). Pengilangan Minyak Bumi	403.64	418.72	434.99	461.21	489.86
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	232.65	246.34	267.44	281.49	301.61
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	200.24	214.97	238.18	246.24	257.51
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	232.15	245.44	259.64	269.31	292.92
4). Kertas & Barang Cetak	214.08	226.54	247.76	274.28	293.92
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	287.26	299.74	332.90	366.04	395.50
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	339.00	352.02	368.75	392.92	424.57
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	231.43	243.51	256.82	303.44	333.98
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	329.15	347.09	364.12	383.30	411.41
a. Listrik	338.85	357.26	374.61	394.51	424.36
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	253.73	265.50	278.12	289.10	301.92
5. BANGUNAN	220.87	242.11	266.66	297.66	324.36
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	145.34	150.13	163.17	173.98	185.49
a. Perdagangan Besar & Eceran	145.34	150.13	163.16	173.98	185.49
b. Hotel	143.57	149.36	158.12	171.74	178.04
c. Restoran	289.77	318.10	345.47	351.94	359.34
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	247.73	269.62	295.87	316.10	343.98
a. Pengangkutan	257.78	281.62	313.90	338.01	370.88
1). Angkutan Rel	351.55	381.73	381.73	391.65	401.59
2). Angkutan Jalan Raya	258.87	282.61	318.57	346.55	377.77
3). Angkutan Laut	256.27	281.10	306.26	324.78	362.30
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	251.17	274.44	311.22	338.49	365.77
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	258.92	281.33	318.10	343.28	371.98
b. Komunikasi	203.63	219.43	224.22	232.82	246.30
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	218.00	232.60	247.85	261.54	273.49
a. Bank	214.09	232.89	245.06	254.06	265.85
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	236.86	253.53	271.07	286.23	290.15
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa bangunan	190.11	199.47	212.04	225.40	239.60
e. Jasa Perusahaan	434.50	465.08	510.28	555.51	581.26
9. JASA-JASA	240.83	260.57	284.49	314.78	330.31
a. Pemerintahan	214.09	233.66	260.60	292.43	309.22
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	214.09	233.66	260.83	290.00	306.73
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	214.09	233.66	260.24	296.18	313.04
b. Swasta	284.37	304.25	323.72	352.20	366.21
1). Sosial kemasyarakatan	388.97	413.74	439.05	475.20	486.77
2). Hiburan dan Rekreasi	147.81	153.01	159.89	169.28	173.29
3). Perorangan & Rumah Tangga	247.01	266.57	285.38	312.79	329.48
PDRB	203.97	216.88	236.29	256.53	275.06
PDRB TANPA MIGAS	192.45	205.17	224.30	243.59	262.80
PDRB Perkapita (Rupiah)	203.97	216.88	236.29	256.53	275.06

Catatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 12.
LAJU PERTUMBUHAN INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB KABUPATEN LANGKAT MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008-2012
(PERSENTASE)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 r)	2011 *)	2012 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	8.77	6.97	9.66	9.46	8.27
a. Tanaman Bahan Makanan	8.52	7.18	11.35	7.24	7.98
b. Tanaman Perkebunan	12.58	7.72	9.15	10.91	5.68
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	8.41	9.51	7.68	(0.75)	4.26
d. Kehutanan	3.97	5.02	7.74	13.91	16.32
e. Perikanan	10.02	6.48	9.02	3.88	4.71
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	20.72	9.12	8.77	9.51	6.23
a. Minyak dan Gas Bumi	16.49	8.22	7.73	9.67	3.65
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	29.60	7.56	10.09	7.25	7.13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	14.46	4.88	7.49	5.50	6.59
a. Industri Migas	23.92	3.74	3.88	6.03	6.21
1). Pengilangan Minyak Bumi	23.92	3.74	3.88	6.03	6.21
2). Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	11.78	5.88	8.56	5.25	7.15
1). Makanan, Minuman, & Tembakau	12.38	7.36	10.80	3.38	4.58
2). Tekstil, Brg. Dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	1.00
3). Brg. Dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	10.37	5.72	5.79	3.72	8.77
4). Kertas & Barang Cetak	11.71	5.82	9.37	10.71	7.16
5). Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	13.41	4.34	11.06	9.96	8.05
6). Semen & Brg Galian Bukan Logam	12.09	3.84	4.75	6.56	8.05
7). Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	1.00
8). Alat angkutan, Mesin, & Peralatannya	-	-	-	-	1.00
9). Barang Lainnya	9.79	5.22	5.47	18.15	10.06
4. LISTRIK, GAS, & AIR BERSIH	17.30	5.45	4.91	5.27	7.33
a. Listrik	17.62	5.43	4.85	5.31	7.57
b. Gas Kota	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	13.03	4.64	4.75	3.95	4.43
5. BANGUNAN	11.32	9.62	10.14	11.63	8.97
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.87	3.29	8.68	6.63	6.61
a. Perdagangan Besar & Eceran	5.87	3.29	8.68	6.63	6.62
b. Hotel	5.57	4.03	5.87	8.61	3.67
c. Restoran	15.19	9.78	8.60	1.87	2.10
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	12.94	8.84	9.74	6.84	8.82
a. Pengangkutan	13.90	9.25	11.46	7.68	9.72
1). Angkutan Rel	19.82	8.58	-	2.60	2.54
2). Angkutan Jalan Raya	13.95	9.17	12.72	8.78	9.01
3). Angkutan Laut	13.86	9.69	8.95	6.05	11.55
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	13.50	9.26	13.40	8.76	8.06
5). Angkutan Udara	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00
6). Jasa Penunjang Angkutan	13.95	8.66	13.07	7.91	8.36
b. Komunikasi	10.49	7.76	2.18	3.84	5.79
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	9.07	6.70	6.56	5.52	4.57
a. Bank	10.06	8.78	5.23	3.67	4.64
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	11.73	7.04	6.92	5.59	1.37
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	1.00
d. Sewa bangunan	4.51	4.92	6.30	6.30	6.30
e. Jasa Perusahaan	20.64	7.04	9.72	8.86	4.64
9. JASA-JASA	12.20	8.20	9.18	10.65	4.93
a. Pemerintahan	10.06	9.14	11.53	12.22	5.74
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	10.06	9.14	11.63	11.18	5.77
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	10.06	9.14	11.38	13.81	5.69
b. S w a s t a	14.94	6.99	6.40	8.80	3.98
1). Sosial kemasyarakatan	19.16	6.37	6.12	8.23	2.43
2). Hiburan dan Rekreasi	5.56	3.52	4.49	5.87	2.37
3). Perorangan & Rumah Tangga	12.63	7.92	7.06	9.61	5.34
P D R B	10.03	6.33	8.95	8.56	7.23
PDRB TANPA MIGAS	9.60	6.61	9.32	8.60	7.89
PDRB Perkapita (Rupiah)	-	-	-	-	-

Catatan : r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 13.
PERKEMBANGAN BEBERAPA AGREGAT PDRB DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN LANGKAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2008-2012

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 r)	2011 *)	2012 **)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. TIDAK TERMASUK MINYAK DAN GAS BUMI					
- PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Jutaan Rp.)	11,592,120.85	13,034,192.47	15,078,992.03	17,331,090.05	19,829,337.72
- PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Rupiah)	12,054,645.55	13,509,833.16	15,584,957.68	17,746,627.33	20,298,538.43
- PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	16.28	12.44	15.69	14.94	14.41
- PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	15.87	12.07	15.36	13.87	14.38
- INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	279.68	314.47	363.81	418.14	478.42
- INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	116.28	112.44	115.69	114.94	114.41
B. TERMASUK MINYAK DAN GAS BUMI					
- PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Jutaan Rp.)	13,241,169.62	14,789,832.94	17,037,979.50	19,565,250.18	22,166,496.51
- PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Rupiah)	13,769,491.22	15,329,540.05	17,609,677.69	20,034,354.59	22,690,998.95
- PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	15.62	11.70	15.20	14.83	13.30
- PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	15.21	11.33	14.87	13.77	13.26
- INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	259.31	289.63	333.66	383.15	434.09
- INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)	115.62	111.70	115.20	114.83	113.30

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
) Angka Sangat Sementara

TABEL 14.
PERKEMBANGAN BEBERAPA AGREGAT PDRB DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN LANGKAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2008-2012

LAPANGAN USAHA (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 r) (4)	2011 *) (5)	2012 **) (6)
A. TIDAK TERMASUK MINYAK DAN GAS BUMI					
- PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Jutaan Rp.)	6,023,345.97	6,352,739.98	6,722,626.48	7,114,973.11	7,545,541.68
- PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Rupiah)	6,263,676.99	6,584,562.68	6,948,199.79	7,285,564.60	7,724,083.88
- PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	6.09	5.47	5.82	5.84	6.05
- PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	5.73	5.12	5.52	4.86	6.02
- INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	145.91	153.89	162.85	172.35	182.78
- INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	106.09	105.47	105.82	105.84	106.05
B. TERMASUK MINYAK DAN GAS BUMI					
- PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Jutaan Rp.)	6,491,865.74	6,819,233.67	7,210,562.22	7,626,997.33	8,058,645.95
- PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Rupiah)	6,750,890.66	7,068,079.55	7,452,507.89	7,809,865.32	8,249,329.20
- PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	5.07	5.04	5.74	5.78	5.66
- PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	4.71	4.70	5.44	4.80	5.63
- INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	127.55	133.98	141.67	149.85	158.33
- INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)	105.07	105.04	105.74	105.78	105.66

Catatan : r) Angka Perbaikan
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara



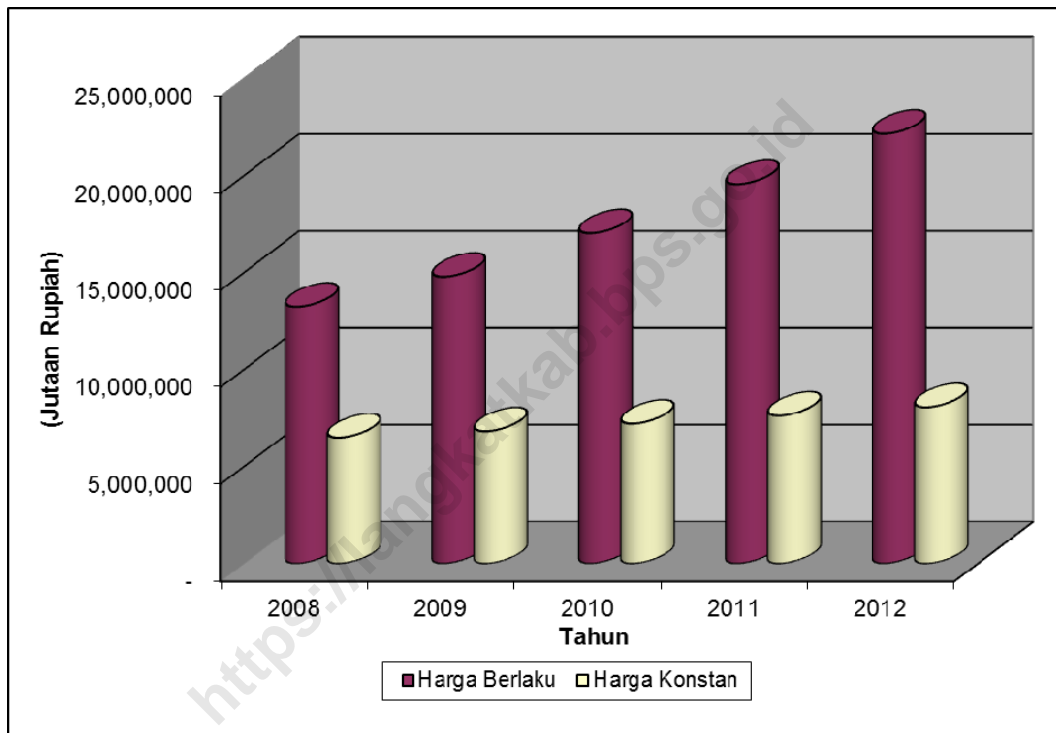
GRAFIK - GRAFIK

Grafik Pokok PDRB Kabupaten Langkat Tahun 2008-2012

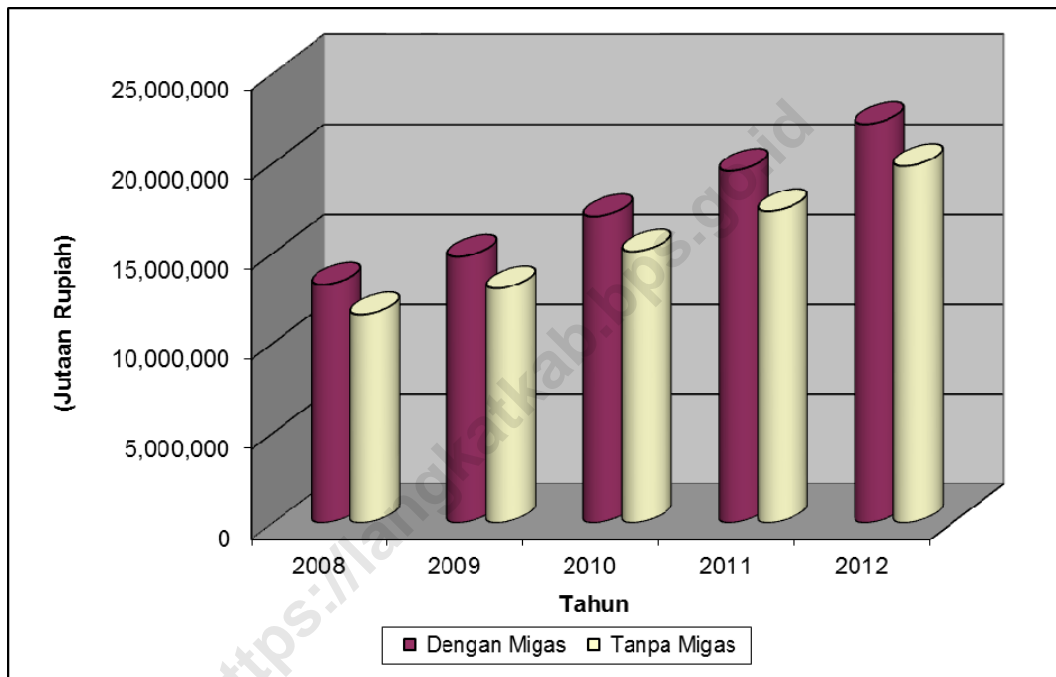
- Atas Dasar Harga Berlaku
- Atas Dasar Harga Konstan 2000

<https://lan.kab.bpp.go.id>

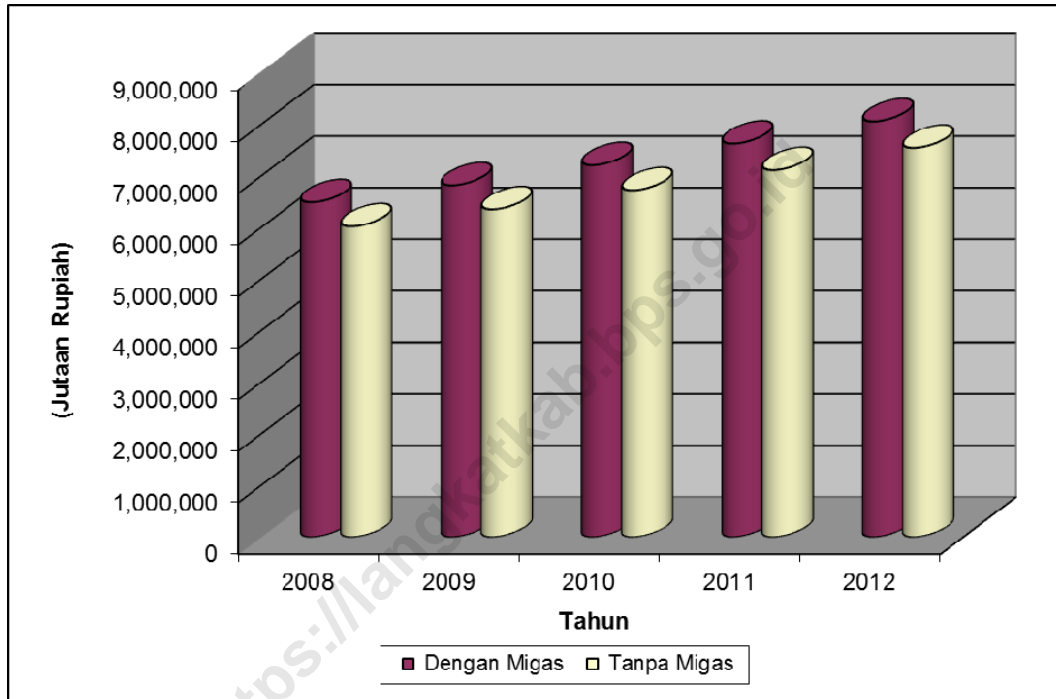
Grafik 1.
PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000
Tahun 2008 – 2012



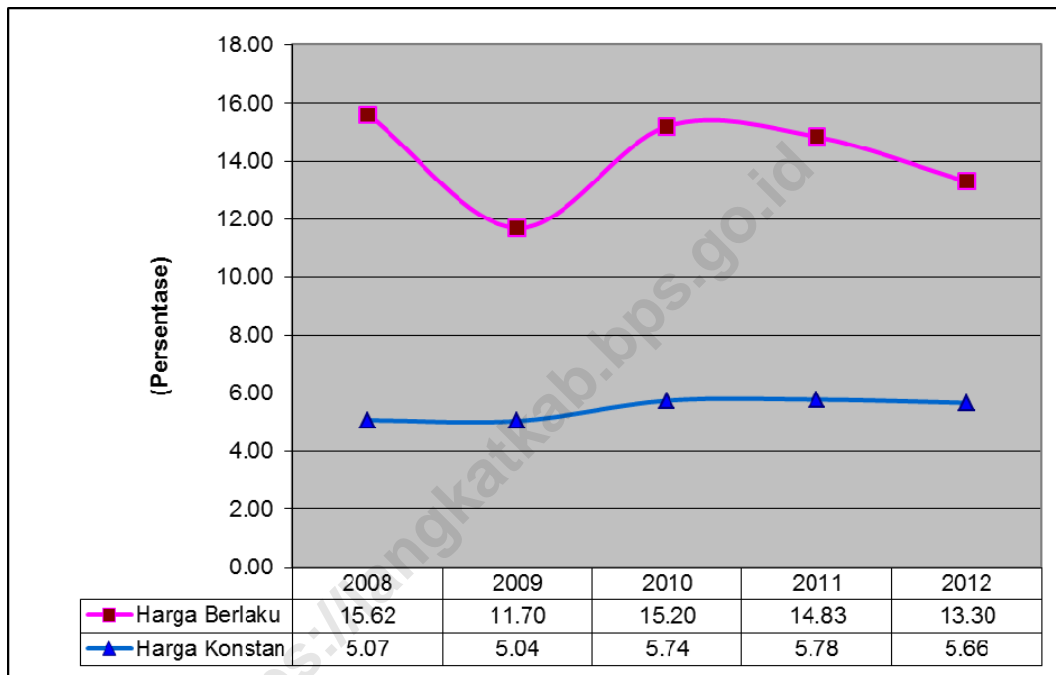
Grafik 2.
PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 – 2012



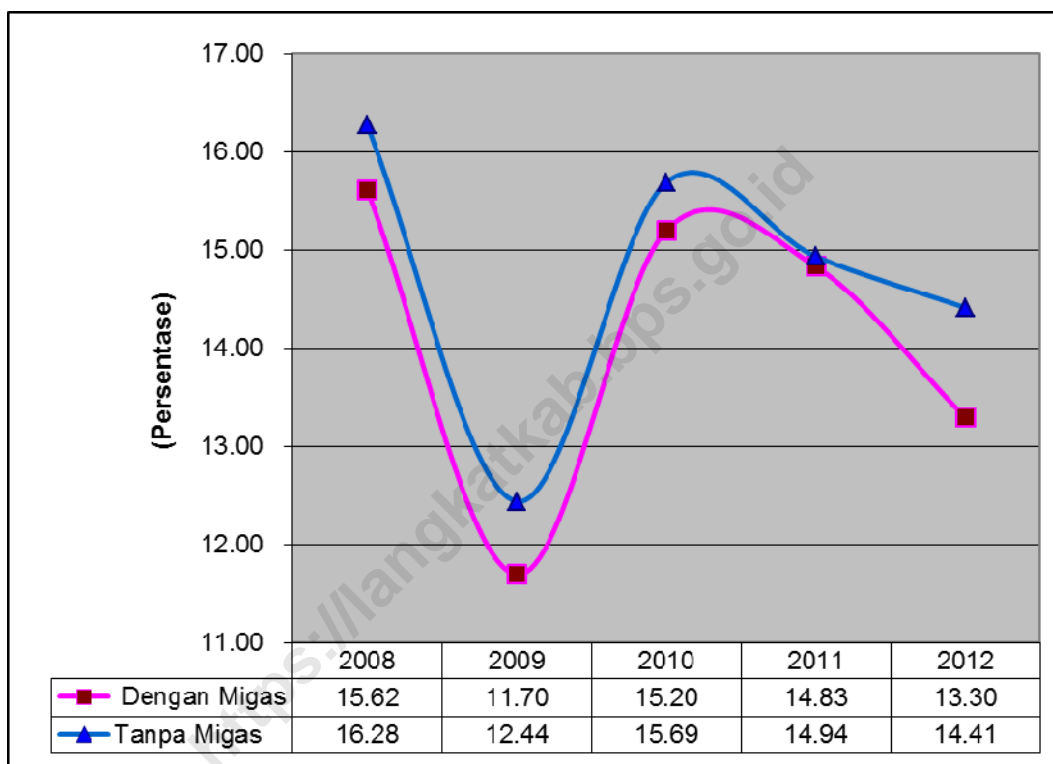
Grafik 3.
PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 – 2012



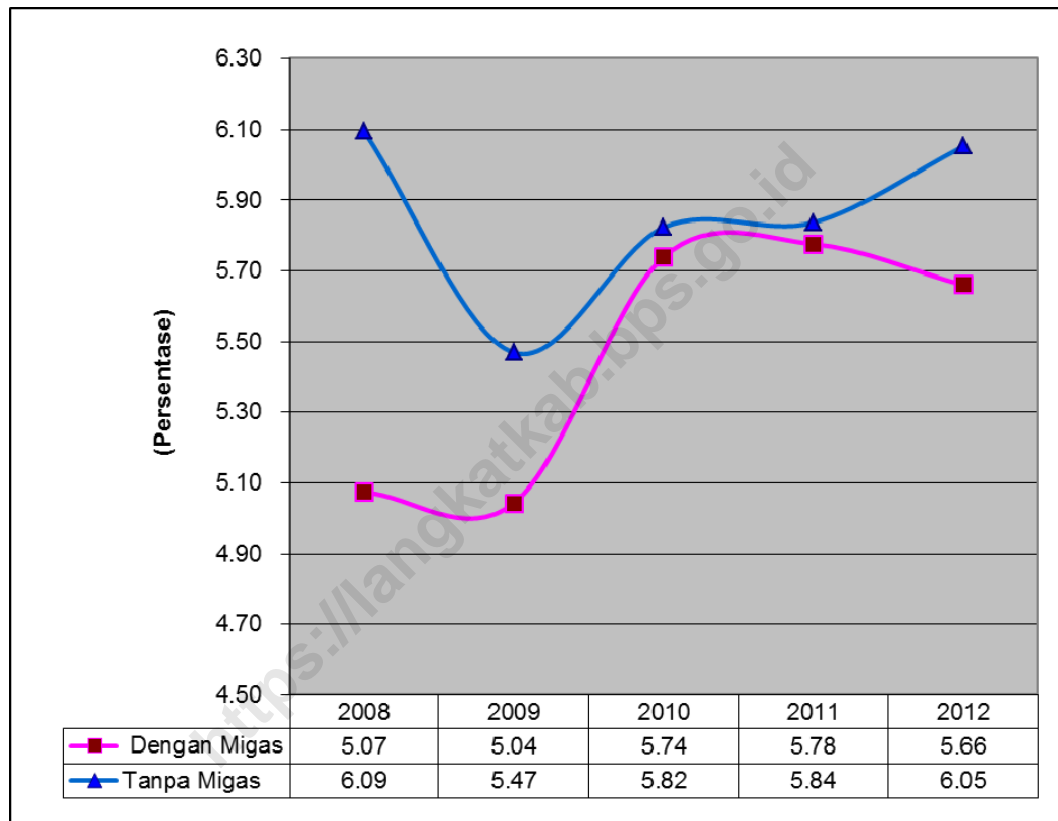
Grafik 4.
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 – 2012



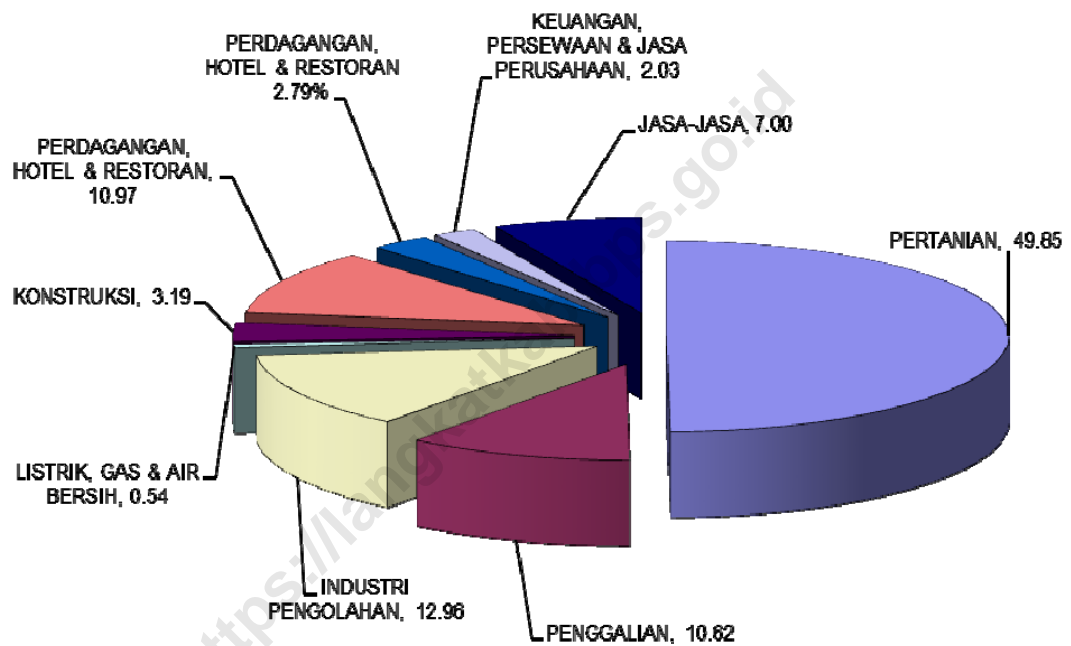
Grafik 5.
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Dengan
 Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 – 2012



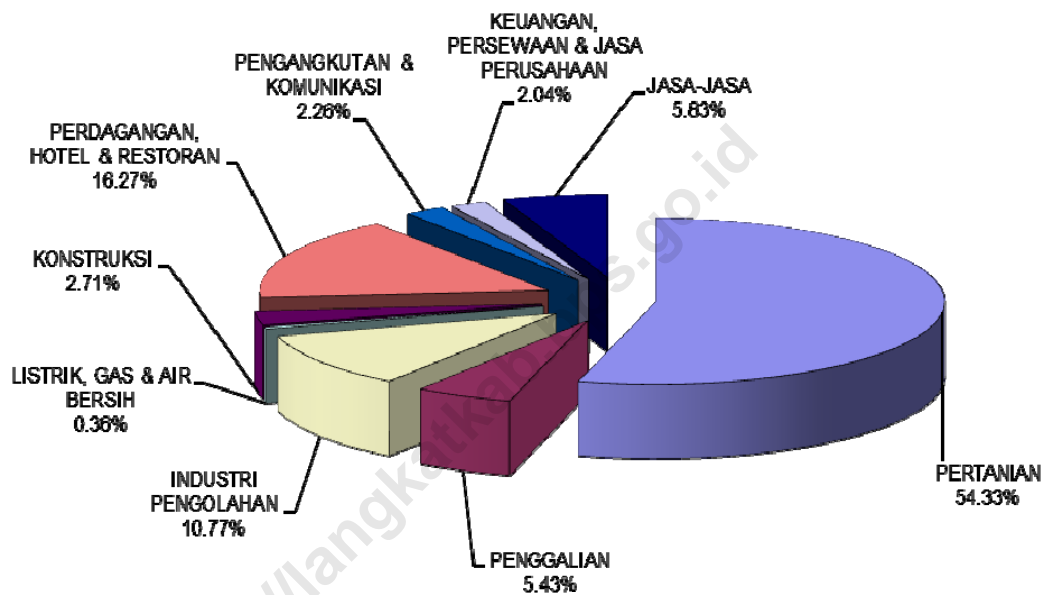
Grafik 6.
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008 – 2012



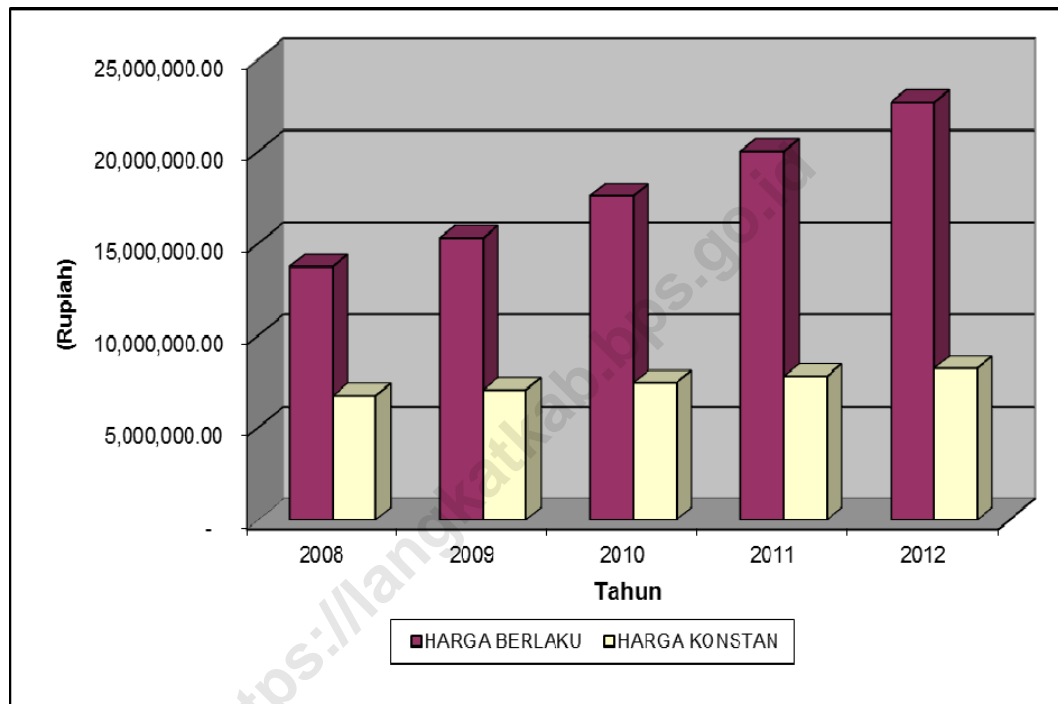
Grafik 7.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012



Grafik 8.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2012



Grafik 9.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 – 2012



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT

Jalan Tengku Putra Azis Nomor 1 Stabat

Telp. 06108910990, Fax. 0618910223, Email: bps1213@bps.go.id

Website: <http://langkatkab.bps.go.id>